



IKHTISAR
SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA

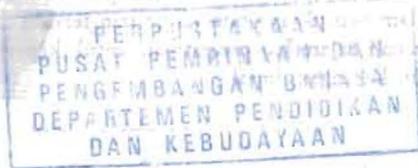
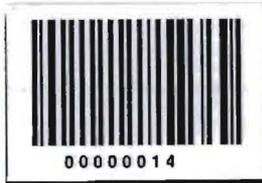
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA

3
181
LI



IKHTISAR SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA

Oleh
Lukman Ali



87.70
8P-N-P

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
1998



Judul Buku

IKHTISAR SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA

Penyusun

Lukman Ali

ISBN 979-459-955 7

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Pustaka Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No. Klasifikasi PB 493.210-1 ALI i	No. Induk : 0558 Tgl : 9-11-98 Tid :

KATA PENGANTAR

Sejak dibawanya huruf Latin ke Indonesia oleh orang-orang Barat bermulalah pemakaian huruf Latin dalam sistem ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, sistem ejaan itu belumlah dapat disebutkan sudah baku karena penulis/ahli orang Barat itu menentukannya menurut apa yang didengarnya dan menuliskannya dengan kaidah ejaan bahasanya sendiri. Ejaan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri.

Pigafetta, yang pada awal abad ke-16 membuat sistem ejaan bahasa Melayu, adalah satu contoh. Ahli-ahli lain seperti Joannes Roman juga demikian. Jadi, ada bermacam cara penulisan bahasa Melayu pada waktu itu sampai kemudian pada tahun 1901 Ch. A. van Ophuijsen menetapkan secara resmi ejaan yang baku dan berlaku di seluruh Indonesia (Hindia Belanda).

Sesungguhnya ejaan bahasa Indonesia telah mengisi sejarah kehidupan bahasa Indonesia yang berkembang dalam berbagai situasi dan lingkungan. Inilah yang mendorong perlunya disusun sejarah ejaan bahasa kita agar kita mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi mengenai masa lalu dan mengambil manfaat dengan penuh kecendekiaan menghadapi perkembangan bahasa Indonesia lebih lanjut.

Kita memang perlu menoleh ke belakang sebelum mengayunkan langkah ke depan yang penuh tantangan. Tolehkan yang untuk sementara tersusun secara ringkas dan sederhana ini dimungkinkan oleh bantuan dorongan dan bahan dari beberapa kawan antara lain Sdr. Harimurti Kridalaksana, Sdr. Basuki Suhardi, Sdr. Djoko Kentjono, Sdr. Sri Sukesi Adiwimarta (ketiganya dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia), Sdr. S. Effendi dan khususnya Sdr. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selaku Ketua Pelaksana Kongres Bahasa Indonesia VII, yang telah menugasi penyusun buku ini dan Sdr. Nafron Hasjim yang telah memberikan tenaganya untuk membantu penyuntingan naskah buku ini. Di samping itu, tak dapat pula dilupakan Sdr. Hasjmi Dini yang telah menguruskan segala sesuatunya sampai buku ini selesai.

Amat besar penghargaan saya kepada kawan-kawan penetik yang telah bersusah payah menyelesaikan penetik naskah buram sampai siap cetak, antara lain Sdr. Samijati, Kartiyah, Sri Kanti Widada, dan Warno, untuk menyebut beberapa nama.

Adakah ungkapan yang paling tepat selain ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk semua itu?

Jakarta, 28 Oktober 1998

Lukman Ali

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Buku kecil ini, sesuai dengan judulnya, baru merupakan ikhtisar sejarah ejaan bahasa Indonesia. Dalam keadaan seperti itu tentulah masih banyak yang belum teruraikan. Walaupun demikian, penyusunan ikhtisar ini sudah merupakan upaya yang harus dihargai karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita dewasa ini.

Buku *Ikhtisar Ejaan Bahasa Indonesia* ini memberikan gambaran ringkas mengenai proses penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, yang digunakan saat ini. Dengan membaca buku ini secara cermat, kita dapat mengetahui bahwa perubahan dari satu sistem ejaan ke sistem ejaan yang lain memerlukan perjuangan yang memakan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja dana yang sukar dinilai. Oleh karena itu, adanya sistem ejaan yang kita gunakan sekarang hendaknya menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Perubahan suatu sistem ejaan bukanlah sesuatu yang diadadakan, tetapi mempunyai tujuan luhur, yaitu upaya penyempurnaan bahasa Indonesia, bahasa nasional, yang juga merupakan bahasa negara kita.

Kita sambut kehadiran buku ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada penulisnya.

Jakarta, 28 Oktober 1998

Hasan Alwi

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA	v
DAFTAR ISI	vi
I. Pendahuluan	1
II. Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia dalam Huruf Latin	2
III. Pemasarakatan Ejaan	11
IV. Segi-segi Ejaan yang Menjadi Masalah	16
V. Penutup	25
VI. Daftar Pustaka	27
LAMPIRAN	
1. Keputusan Menteri P dan K No. 03/a.i/1972	30
2. Komunike Bersama	37
3. Pokok-Pokok Penjelasan Menteri P dan K dalam Sidang Kabinet, Agustus 1972	39
4. Surat Keputusan Menteri P dan K No. 062/1977	42
5. Usaha Penyempurnaan Ejaan dalam Rangka Pembakuan Bahasa Indonesia (Lukman Ali)	48
6. Ejaan sebagai Mas'alah (Ajip Rosidi)	58

SEJARAH SINGKAT EJAAN BAHASA INDONESIA DALAM HURUF LATIN

I. Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia kita telah mengetahui bahwa salah satu usaha untuk mengukuhkan persatuan bangsa ialah dengan pemanfaatan penggunaan bahasa. Kita telah sering melakukan usaha ini dengan sungguh-sungguh sejak sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Hanya sayang di sana sini ada yang belum mencapai tujuannya dengan sempurna. Hal dimaksud yang menonjol, misalnya, ialah usaha menyusun konsep salah satu aspek bahasa yaitu penyusunan suatu sistem ejaan bahasa khususnya dalam huruf Latin.

Pemerintah sejak awal abad ini telah beberapa kali mengajukan sistem ejaan dengan tujuan untuk memodernkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada apa yang telah dilakukan panitia-panitia ejaan mulai dari panitia Ch. A. van Ophuijsen atas nama pemerintah jajahan Belanda (1901) dan panitia-panitia seperti panitia *Ejaan Republik* oleh Soewandi (1947), panitia *Ejaan Pembaharuan* (Priyono, 1957), panitia *Ejaan Melindo* (Slametmuljana, 1959), panitia *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* (Anton Moeliono, 1967), dan panitia *Ejaan yang Disempurnakan* (EYD) (I.B. Mantra, 1972). Akhirnya, sistem EYD ini disahkan oleh Presiden Soeharto secara resmi (17 Agustus 1972).

Kita menyadari bahwa sistem EYD masih ada rumpangnya dalam beberapa hal, seperti penulisan kata majemuk, huruf kapital, dan tanda-tanda baca lainnya. Oleh karena itu, wajarlah kemudian dirasakan kekurangannya di sana-sini karena perjalanan hidup ejaan sejak tahun 1972 itu telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman.

Dalam pembicaraan tentang sejarah ejaan ini kita perlu memperhatikan bagaimana ejaan itu dimasyarakatkan sampai ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Terlihat nanti bahwa hal ini melalui kesukaran yang banyak liku-likunya.

Berikut ini kita akan memperbincangkan ikhtisar sejarah ejaan bahasa Indonesia dalam huruf Latin (ejaan dalam huruf Arab-Melayu atau huruf Jawi tidak termasuk dalam perbincangan ini).

II. Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia

Kalau kita berbicara tentang Ejaan Bahasa Indonesia, kita perlu lebih dahulu melihat perkembangan Bahasa Indonesia sejak dahulu sampai masa sekarang ini. Sudah diketahui bahwa pada masa beberapa ratus tahun yang lalu bahasa Indonesia tersebut belum lagi disebut bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Nama Indonesia itu baru datang kemudian. Sudah diketahui pula bahwa pada masa Sriwijaya telah dikenal sejumlah prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu Kuno dengan memakai huruf Pallawa (India) yang dipengaruhi banyak oleh bahasa Sanskerta seperti juga halnya bahasa Jawa Kuno. Jadi, bahasa itu belum menggunakan huruf Latin.

Bahasa Melayu Kuno inilah yang kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia terutama masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam (abad ke-13). Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dan politik. *Lingua franca* ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan.

Pedagang-pedagang asing, seperti pedagang-pedagang Cina, berusaha mengetahui sedapat-dapatnya bahasa Melayu itu untuk kepentingan mereka, umpamanya dengan jalan menyusun sebuah daftar kata Cina-Melayu yang berasal dari abad ke-15 yang berisi lebih kurang 500 kata atau lema (*entry*). Oleh para ahli, daftar kata ini dianggap yang tertua dan sebagai karya leksikografi yang awal pula, sedangkan kamus tertua dalam sejarah bahasa-bahasa di Indonesia ialah *Spraeck ende woord-boek Inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende Turesche Woorden* (1608) karangan Frederich de Houtman, dan *Vocabularium Ofte Woordboek naer order vanden*

alphabet in Duytsch-Maleysch ende Maleysche-Duytsch (1623) karangan Casper Wiltens dan Sebastianus Dancaerst (lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1991 Edisi II hal. XXL). Dalam kamus ini kata-kata Indonesia juga ditulis dalam huruf Latin sebagaimana disusun oleh Pigafetta sebelumnya (1522) dalam daftar kata *Vocabuli de Quæsti populi mori* (daftar kata yang digunakan orang Islam).

Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan **huruf Arab** yang juga berkembang menjadi huruf Arab-Melayu (penambahan dengan beberapa tanda untuk beberapa huruf dalam menyesuaikan dengan bunyi-bunyi bahasa Melayu (*tj*, *nj*, *g*, dan *ng*). Penulisan ini dipakai dalam naskah-naskah Melayu lama, seperti dalam karya-karya sastra dan buku-buku pengajaran agama (Islam) dan juga sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum datangnya huruf Latin atau huruf Romawi yang mulai digunakan untuk penulisan bahasa Melayu walaupun masih sangat terbatas. Daftar kata yang disusun oleh Pigafetta adalah sebagai contoh pertama bagi bahasa Melayu yang ditulis dalam huruf Latin. Perhatikanlah contoh-contoh di bawah ini yang dikutip dari daftar Pigafetta sebagai dikatakan di atas. Perhatikan ejaannya.

Pigafetta

alla
naceran
musulman Islam
mischit
anach
saudala sopopu
poran poan
dai
matta
cenin
Jdon
tanghan

Sekarang

Allah
 Nasrani
 Muslimin Islam
 mesjid
 anak
 saudara sepupu
 perempuan
 dahi
 mata
 kening
 hidung
 tangan

<i>Janghut</i>	janggut
<i>missai</i>	misai
<i>botto</i>	butuh (kemaluan laki-laki)
<i>salibu</i>	seribu
<i>salacza</i>	selaksa
<i>tujuppolo</i>	tujuh puluh

Sebenarnya ejaan sebagaimana yang digunakan oleh Pigafetta ini belumlah dapat disebut ejaan Latin untuk bahasa Melayu karena penulisannya itu tentu berdasarkan pendengaran dan tangkapan Pigefetta terhadap ucapan orang Melayu, lalu menuliskannya dalam ejaan huruf Latin menurut ejaan Italia. Begitu juga kata-kata Melayu susunan de Houtman dan susunan Casper Wiltens dan Sebastianus Dancaerts yang dituliskan dengan huruf Latin.

Selanjutnya Joannes Roman mengeluarkan pula *Grondt ofte Kort Bericht Van de Maleysche Tale*, 1653, yang dicetak tahun 1674. Frederick de Houtman, Casper Wiltens, serta Sebastianus Dancakerst dan Joanes Roman adalah orang-orang Belanda. Mereka menuliskan kata-kata Melayu tentu dalam ejaan bahasa Belanda masa itu. Sebagai contoh disajikan daftar berikut.

Joanes Roman	Sekarang
<i>Hhadji</i>	haji
<i>[bab</i>	sebab
<i>kardja'an</i>	kerajaan
<i>elmou</i>	ilmu
<i>Insja Alla</i>	Insya Allah
<i>[a hari hari</i>	sehari-hari
<i>kolouar</i>	keluar
<i>ket[iil</i>	kecil
<i>ponja roema</i>	punya rumah

lebeh befar
koue[saan
malou
adda pon

lebih besar
kekuasaan
malu
adapun

Tulisan Latin untuk bahasa Melayu oleh de Houtman serta Casper Wiltens dan Sebastianus Dancaerts belum dapat ditemukan oleh penulis karena naskahnya tidak ada di Perpustakaan Nasional.¹

Ejaan bahasa Indonesia dalam huruf Latin ini sampai lebih kurang tiga abad barulah mendapat perhatian untuk dibakukan, yaitu dengan adanya usaha penetapan ejaan yang dilakukan oleh Ch. A. van Ophujsen. Pada waktu itu terasa sekali kebutuhan akan penyempurnaan sistem ejaan bahasa Melayu dalam huruf Latin. Belum ada kesatuan penulisan ejaan atau ortografi bahasa Melayu yang terdapat di Indonesia pada waktu itu. Bahasa Melayu memang terdiri atas bermacam dialek (terutama di kota-kota pelabuhan atau pusat perdagangan). Kondisi keberagaman ini mula-mula tampaknya dipertahankan oleh penjajah untuk tidak menyatukan bangsa dan bahasa Indonesia. Jadi, keseragaman ejaan adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan.

Entah untuk maksud yang baik, seperti untuk kelancaran komunikasi ataupun maksud lainnya untuk penelitian ilmiah, budaya, dan agama, Ophujsen (pemerintah Belanda) menetapkan suatu sistem ejaan yang baru bagi bahasa Melayu, seperti yang tercantum dalam *Kitab Logat Melajoe*.

Sebelum itu, yaitu dalam masa sebelum ketetapan Ophujsen (1674--1901), bahasa Melayu yang dituliskan dalam huruf Latin (dan yang) menurut Ophujsen masih perlu disempurnakan karena belum seragam, contohnya adalah sebagai berikut.

¹ Menurut Harimurti Kridalaksana, naskah-naskah susunan de Houtman, dan Capers Wiltens serta Sebastian Dancaert dan Joana Roman tersebut di atas tersimpan di negeri Belanda (Perpustakaan Universitas Leiden) Naskah Roman ada fotokopinya pada Harimurti sempat penulis pinjam untuk difotokopi pula.

<i>bijasa</i>	<i>boewah</i>
<i>perijoeq</i>	<i>ádil</i>
<i>qartas</i>	<i>faşal</i>
<i>wěrna</i>	<i>koewèh</i>
<i>hěning</i>	<i>perkataan</i>

Contoh di atas diambil dari *Tjampoer Adoeq Melajoe* oleh van Ophuijsen, Van Dorp, Semarang, 1883.

Contoh lain penulisan bahasa Melayu dalam huruf Latin lebih kurang dua setengah abad kemudian (dari Roman sampai Ophuijsen [1674--1901]) adalah seperti kutipan dari *Surat Chabar Melajoe* 1856 berikut.²

Chabar di Soerabaija, 8 Janoeari 1856

Pada hari Rebo ada soldadoe Walanda djaga di pendjagan besar dan toesoek orang prampoean Djawa. Dari sebab lekas dapet obat, mangka itoe orang tinggal hidoep. Dari sebabnja, orang misi tida taoe, mangka itoe soldadoe soeda dipegang.

Selanjutnya Ophuijsen menerangkan dalam *Kitab Logat Melajoe. Wordenlyst voor De Spelling Der Maleische Taal Met Latynsche Karakter*, cetakan ke 7, hal.X s.d. XVI, mengenai rangkaian huruf dalam kata Melayu dan juga dalam kata asing, yang sudah lazim digunakan oleh orang Melayu. Setelah itu, disusun pula oleh Ophuijsen daftar kata secara alfabetis yang ditetapkan ejaannya dalam bahasa

² Lihat makalah Sajuti Kurnia, "Peranan Koran-Koran Indonesia dalam Pengembangan Bahasa Indonesia", *Kongres Bahasa Indonesia IV*, Dep. P. dan K., Jakarta, 1992.

Melayu. Akan tetapi, kemudian banyak pula kekurangan yang terlihat seperti dalam pemakaian tanda-tanda diakritik (*tanda trema*), seperti pada kata *permulaan* (permulaan), dan *tanda bunyi 'ain* seperti pada kata *ma'lum* (maklum) dan *ra'jat* (rakyat) yang dianggap tidak praktis.

Hal ini semuanya dirasakan oleh masyarakat pemakai bahasa Melayu (yang kemudian diikrarkan menjadi bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928) terutama para pemakai dan ahli bahasa yang merasa perlu untuk menyempurnakan lagi ejaan Ophuijsen itu. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Ophuijsen ini terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I 1938 di Solo, yang sembilan tahun kemudian terwujud dalam sebuah Putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, 15 April 1947, tentang perubahan ejaan baru. Perubahan tersebut terlihat, antara lain, seperti di bawah ini.

Ophuijsen 1901

boekoe

ma'lum

'adil

mulai

masalah

tida'

pende'

Soewandi 1947

buku

maklum

adil

mulai

masalah

tidak

pendek

Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan tahun 1947. Tidak ada reaksi yang besar yang bersifat menolak. Hal ini mungkin oleh situasi revolusi melawan penjajahan Belanda. Waktu perubahan ejaan ini ditetapkan semua rakyat Indonesia sedang berjuang melawan kembalinya penjajahan Belanda.

Penggunaan Ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai **Ejaan Soewandi** atau **Ejaan Republik** sebenarnya memancing pula reaksi yang muncul kemudian, yaitu setelah pemulihan kedaulatan (1949). Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan.

Ide itu baru muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan (1954). Waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ialah Mr. Muh. Yamin. Dalam Kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan lihat Majalah **Bahasa dan Kesusastraan** seri khusus No. 9, 1972 sebagai berikut.

- 1) Ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf.
- 2) Penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten.
- 3) Ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah.

Keputusan kongres itu ditindaklanjuti oleh suatu panitia ejaan yang diangkat oleh Pemerintah. Panitia itu menyelesaikan tugasnya pada tahun 1957. Hasil pekerjaan panitia itu ialah berupa konsep sistem ejaan yang disebut *Ejaan Pembaharuan*. Ketuanya ialah Prijono yang pada waktu itu menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Perubahan yang menonjol dalam konsep ini ialah adanya beberapa huruf baru yang jelas tidak praktis. Sebagaimana diketahui konsep tersebut tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya perkembangan baru yang mempengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan (1954), ikut pula hadir utusan-utusan Persekutuan Tanah Melayu. Terilhami oleh Kongres Medan itu, mereka kemudian mengadakan pula kongres bahasa di Singapura (1956). Dalam kongres di Singapura itu dicetuskan suatu resolusi untuk menyatukan Ejaan Bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan Ejaan Bahasa Indonesia di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya ialah disetujuinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang masing-masing diwakili Perdana Menteri, H. Djuanda Kartawidjaja dan timbalan Perdana Menteri, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein. Sebagai kelanjutan perjanjian ini dibentuk panitia bersama Indonesia-Melayu yang kemudian menghasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama *Ejaan Melindo* (Ejaan Melayu-Indonesia). Panitia ejaan ini diketuai oleh Slametmuljana (Indonesia) dan Syed Nassir bin Ismail (Persekutuan

Tanah Melayu).

Kedua pemerintah sepakat untuk meresmikan Ejaan Melindo selambat-lambatnya bulan Januari 1962. Akan tetapi, seperti kita ketahui pula kesepakatan ini tidak sempat terwujud karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian.

Seperti disebut di atas yang menonjol dalam konsep ini ialah adanya huruf-huruf baru atau huruf lama yang diberi tugas baru. Jika huruf-huruf itu digunakan tentulah akan mendapat reaksi dari masyarakat karena huruf-huruf tersebut tidak ada dalam mesin tik kecuali *c* dan *j*. Jadi, syukurlah huruf-huruf tersebut kemudian tidak jadi dipakai atau diciptakan karena terhalang oleh peristiwa konfrontasi tersebut di atas. Perhatikanlah perbandingan huruf-huruf seperti di bawah ini.

**Perbandingan Huruf-huruf
dalam Konsep-konsep Ejaan Bahasa Indonesia**

OPHUYSEN 1901	SOEWANDI 1947	PEMBAHARUAN 1957	MELINDO 1966	LBK
tj	tj	t	c	c
dj	dj	j	j	j
nj	nj	ñ	ŋ	ny
sj	sj	ś	s	sy
ng	ng	ŋ	ŋ	ng
ƒ	ƒ +)	ƒ +)	ƒ	ƒ
-	v + o	v +)	-	-
z	z +)	z +)	z	z
ch	ch +)	-	-	kh
j	j	y	y	y
é, e	e, e	e	e, e	e
ai	ai	ay	ay	ai
au	au	aw	aw	au
oi	oi	oy	oy	oi

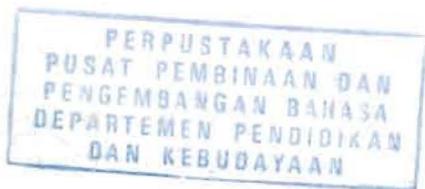
+) = Tidak ada dalam konsep yang bersangkutan.
Dianggap tambahan (asing)

Ketidaksetujuan atas konsep Melindo dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) yang pada tahun 1966 membentuk sebuah panitia dengan Anton M. Moeliono sebagai ketua. Lembaga ini kemudian mengusulkan sebuah konsep baru sebagai ganti konsep Melindo itu. Berbeda dari konsep Melindo, konsep LBK tidak menggunakan sama sekali huruf-huruf baru. Panitia ini kemudian disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 062/1967 tanggal 19 September 1967.

Pihak Indonesia, dalam hal ini KOTI G V (Komando Operasi Tertinggi Gabungan V) dan Komando Mandala Siaga (Kolaga) membentuk Tim Ahli Bahasa KOTI dengan S.W. Rujianti Mulyadi sebagai ketua, A.M. Moeliono sebagai wakil ketua, serta Lukman Ali, Djoko Kentjono, dan Basuki Suhardi sebagai anggota, tanggal 21 Februari 1967. Melalui panitia ini pihak Indonesia menyampaikan kepada Malaysia keberatan terhadap konsep Melindo dengan alasan, antara lain, ketidakpraktisan konsep Melindo karena adanya huruf baru.

Akhirnya pihak Malaysia menerima konsep LBK dalam sebuah perundingan di Kuala Lumpur antara Tim Ahli Bahasa KOTI dan Nyonya S.W.R. Mulyadi sebagai ketua perutusan Indonesia dan Ketua Jawatan Tetap Ejaan Bahasa Malaysia, Syeh Nasir bin Ismail sebagai ketua perutusan Malaysia. Dengan ditolaknya konsep Ejaan Melindo ini dan diterimanya konsep LBK, lewat satu tahap pula usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Konsep LBK yang sempat pula dibahas dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak (1972) akhirnya menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia.

Sejak itu mulai lagi usaha yang lebih pasti untuk memasyarakatkan sistem ejaan yang baru itu yang disebut Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Sebenarnya, analog dengan nama *Ejaan van Ophuijsen* dan *Ejaan Soewandi*, EYD dapat disebut *Ejaan Mashuri* karena Mashurilah yang dengan sepenuh tenaga memperjuangkannya sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden.



III. Pemasyarakatan Ejaan

Pemasyarakatan EYD adalah usaha menanamkan pengertian tentang pentingnya pembakuan ejaan di kalangan masyarakat luas. Usaha itu tidaklah mudah, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat saat diperkenalkannya sistem ejaan itu.

Pengalaman pada tahap pertama lebih kurang selama beberapa tahun yaitu antara 1966—1969, membuktikan bagaimana sulitnya melakukan penjelasan secara objektif ilmiah. Hal ini kurang terungkap dan kurang banyak diketahui. Ada pula alasan lain untuk menolak konsep EYD dengan menuduh bahwa ejaan baru dikatakan sebagai salah satu mata rantai kegiatan *Nekolim* (*Neo Kolonialisme, Kolonialisme, dan Imperialisme*) sebagaimana yang dikatakan oleh Bagin, Sesjen LKN dari kelompok PNI Ali Surachman. Sebagaimana diketahui, kelompok Ali Surachman adalah kelompok yang cenderung kepada Marxisme sebagaimana tercantum dalam doktrin "Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia", seperti yang dianut oleh Soekarno. Jadi tidak mengherankan bila proyek penggantian Malaysia ciptaan Soekarno, ejaan baru terikut pula "diganyang."

Konfrontasi kiranya meninggalkan trauma yang bersarang dalam diri sebagian kalangan masyarakat yang telah sempat "digiring" ke arah "penggantian" Malaysia yang digaungkan oleh Presiden Soekarno. Walaupun panitia ejaan dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (yang kemudian berganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional) telah berusaha memberikan pengertian tentang ejaan itu melalui berbagai penataran dan penyuluhan, banyak kalangan masyarakat yang belum bersedia menerima ejaan baru dengan beberapa alasan.

Alasan yang paling menonjol, selain dituduh sebagai proyek *Nekolim*, ialah pendapat yang menganggap bahwa konsep ejaan bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh Malaysia, bahkan meniru ejaan Malaysia. Hal itu merupakan alasan yang bertolak dari pemikiran politis (masalah hubungan kalah menang) dalam konfrontasi. Pada tahun 1966 konfrontasi dengan pihak Malaysia baru saja berakhir. Saling pengertian telah tercapai antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konfrontasi yang dirumuskan dalam *Record of Understanding on Non Military Matters*.

Kedua pemerintah telah rukun kembali dan telah bersetuju untuk meningkatkan kerja sama persahabatan dalam berbagai bidang, termasuk bidang budaya dan bahasa.

Pada tahun 1967 suhu politik dalam negeri di tanah air agak memanas yang antara lain dikembang dengan masalah agama. Masyarakat, termasuk pers, tidak memperhitungkan situasi ini sehingga timbullah perdebatan yang bertolak dari bidang masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, masalah ejaan tidak lagi diperbincangkan sebagai masalah ilmiah saja, tetapi sudah menjadi masalah politik. Memang diakui bahwa ahli bahasa banyak yang kurang mengikuti perkembangan politik dalam rangka menyempurnakan bahasa Indonesia. Hanya sedikit ahli bahasa yang secara murni mendiskusikan masalah ejaan dengan titik tolak kenyataan dalam tubuh ejaan itu sendiri, tidak dikaitkan dengan politik. Oleh karena itu, para ahli bahasa terutama yang langsung terlibat dalam penyusunan ejaan baru, berusaha memberikan penjelasan sebaik mungkin agar masyarakat dapat melihat atau memahami manfaat penyempurnaan ejaan itu. Untuk itu, dicobalah merumuskan penjelasan untuk disebarakan pula ke dalam masyarakat dan berbagai media massa seperti surat-surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Tetapi cara ini belum menghasilkan apa yang diinginkan. Silang pendapat mengenai ejaan tidak juga selesai, bahkan lebih jauh orang melihat pribadi-pribadi yang menjadi anggota panitia. Muncul lagi anggapan yang berbau SARA. Orang melihat siapa anggota-anggotanya, yang di antaranya ada pemeluk agama selain Islam, yang dianggap menimbulkan keresahan yang disebutkan tadi.

Penjelasan-penjelasan oleh panitia akhirnya banyak sedikit menimbulkan pengertian juga dari masyarakat, walaupun organisasi IPPNU (Ikatan Pemuda Pelajar NU) masih tetap menentang secara resmi (melalui suratnya kepada LBK). Sayang, surat yang merupakan bukti tertulis sudah tidak ditemukan lagi, seperti juga surat dari LKN/PNI Ali Surachman. Yang masih ada hanya surat DPP Gerakan Pemuda Marhaen yang berisi penolakan ejaan baru dengan alasan kurang dirasakan manfaatnya, merupakan pemborosan pikiran dan biaya. Penjelasan ejaan yang dilakukan dengan berbagai cara tadi terpaksa dihentikan oleh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1969) karena diperkirakan dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Tiga tahun kemudian barulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, membuka masalah ini kembali sebagai salah satu kegiatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Rupanya beliau yakin bahwa penyempurnaan ejaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penyempurnaan pendidikan di Indonesia. Jika Mashuri dalam bidang pendidikan mendirikan sekolah-sekolah pembangunan untuk memperoleh lulusan tenaga terampil dalam bidang pembangunan, dalam bidang kebudayaan beliau menganggap perlu bahasa Indonesia dikembangkan sebagai bahasa standar yang dapat menjadi alat komunikasi dalam bidang pembangunan. Dalam bidang politik luar negeri ia menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang diharapkan berpengaruh di Asia Tenggara.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika ejaan baru diperkenalkan kepada masyarakat yang telah menimbulkan bermacam-macam reaksi, Mashuri menyusun strategi penyebaran ejaan itu secara lebih terperinci dan terencana. Ia menugasi sejumlah ahli bahasa dan petugas-petugas lain dari berbagai departemen agar bekerja bersama-sama dalam satu suara yang sama untuk melakukan usaha penyebaran konsep ejaan itu.

Hal pertama yang dapat dilakukan ialah menerangkan secara meluas dasar pemikiran tentang penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 mengenai penjunjangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk meningkatkan mutu bahasa Indonesia dengan melakukan pembakuan atau standarisasi bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan telah ditentukan bahwa bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Melayu seperti juga bahasa Malaysia berdasarkan bahasa Melayu. Kedua bahasa itu dapat mempersatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Kerja pertamanya dalam hubungan ini ialah memanggil sejumlah ahli bahasa agar menggiatkan kembali usaha memasyarakatkan ejaan baru dengan jalan membuat rencana yang konkret antara lain dengan mengadakan seminar-seminar atau ceramah-ceramah, diskusi, simposium,

dan kesempatan pertemuan lain.

Ditentukanlah ada tiga bidang yang perlu diberi prioritas dalam rangka standardisasi itu, yaitu tata bahasa, ejaan, istilah/perkamusan. Menteri Mashuri ikut dengan sepenuh tenaga dalam tugas penyebaran konsep ejaan. Pada tingkat atas beliau melakukan pendekatan kepada DPR, kabinet, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh serta instansi-instansi tinggi lain. Beliau dibantu oleh sejumlah tenaga ahli bahasa dan tenaga bidang-bidang lain untuk secara intensif menyebarkan penjelasan rencana pelaksanaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Ada tujuh kelompok yang mendampingi dan bekerja sama dengan kelompok teknis bahasa. Kelompok teknis ini ditugaskan menyiapkan konsep EYD sebagai bahan pokok untuk disampaikan kepada masyarakat luas dengan dasar konsep Ejaan LBK yang telah melalui beberapa kali perubahan seperti yang sudah disebut sebelum ini. Kegiatan panitia pelaksanaan EYD ini dikukuhkan dengan surat putusan No. 03/A.I/72, tanggal 20 Mei 1972 (lihat lampiran). Kelompok-kelompok nonteknis bahasa ialah perencanaan, logistik, penerangan, hubungan khusus, dan sekretariat.

Khusus untuk kelompok bahasa dapat disebut

1. Lukman Ali (Ketua merangkap anggota),
2. Ny. S.W. Rujianti Mulyadi (anggota),
3. Djoko Kentjono (anggota),
4. Basuki Suhardi (anggota),
5. H.E. Harimurti Kridalaksana (anggota),
6. S. Effendi (anggota), dan
7. Dahnil Adnani (anggota).

Selain petugas-petugas kelompok teknis bahasa, ahli-ahli bahasa yang tidak termasuk dalam panitia tidak kurang bantuan mereka untuk menyebarkan EYD dengan bersama-sama memberikan penyuluhan di instansi-instansi, badan-badan, masyarakat, baik di Ibukota maupun daerah-daerah, antara lain Djoko Kentjono dan Basuki Suhardi

(Lampung), S.W. Rujati Mulyadi dan Djoko Kentjono (Sulawei dan Bali), Lukman Ali dan Basuki Suhardi (Sumatera Utara dan Sumatera Barat), Muhadjir dan Basuki Suhardi (Jawa Tengah), Harimurti dan Lukman Ali (Sidang Kabinet), Lukman Ali dan Basuki Suhardi (DPR).

Anggota tim penyuluhan ini memperoleh pengalaman manis dan pahit, umpamanya serangan tentang penulisan kata-kata Arab yang dianggap merugikan umat Islam, meniru ejaan Malaysia, merugikan bidang pendidikan, proyek Nekolim, yang semuanya itu menyebabkan direparasinya semua mesin tik. Bahkan, ada pula yang menuduh panitia menerima uang suap dari luar negeri. EYD ini sering diejek dengan menyebutnya "ejabu" (ejaan baru). Tampaknya para pengejek itu menghubungkannya dengan sebutan "Manikebu" untuk Manifes Kebudayaan. Syukurlah semuanya itu dapat dijawab dan diatasi dengan lancar dan dada lapang.

Sesudah deremikan Presiden, EYD tidak lagi menjadi bulan-bulanan oleh sebagian masyarakat dan media massa. Dalam masa tugas panitia EYD ini, pada tanggal 23 Mei 1972, terjadi lagi kontak antara Malaysia dan Indonesia yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut *Komunike Bersama* yang berisi perlunya kerja sama bahasa dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu kegiatan yang ditetapkan ialah membentuk Panitia Tetap Bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing. Khusus mengenai masalah ejaan, pada tanggal 26 Juni 1967 disepakati untuk melaksanakan jiwa persetujuan ahli kedua negara tentang ejaan yang telah disempurnakan. Pihak Malaysia diwakili oleh Huessein Onn (Menteri Pelajaran Malaysia) dan pihak Indonesia oleh Mashuri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI).

Komunike itu mendorong perwujudan Ejaan Bersama Bahasa Indonesia/Malaysia yang akhirnya menjadi kenyataan. Sesudah penetapan resmi EYD didirikanlah badan kerja sama bahasa Indonesia dan Malaysia yang disebut *Majelis Bahasa Indonesia Malaysia (MABIM)*.

Dalam sidang-sidang Majelis ini dibicarakan penyerasian ejaan Indonesia dan Malaysia, dengan catatan hal-hal yang tidak dapat disamakan dibiarkan saja berlaku pada masing-masing ejaan, umpamanya

penyebutan nama-nama huruf, penulisan kata-kata mejemuk dan kata-kata serapan. MBIM ini kemudian berkembang menjadi Mabbim (Mejelis Bahara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia) yang merupakan kelanjutan MBIM dengan penyempurnakan sistem kerja agar diperoleh hasil yang lebih meningkat.

Proses sejarah ejaan dan kerja sama kebahasaan dengan Malaysia serta kelanjutannya secara ringkas dapat dilihat dalam bagan pada halaman berikut.

IV. Segi-segi Ejaan yang Menjadi Masalah

Dalam upaya menyebarluaskan konsep ejaan baru itu terdapat beberapa hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Untuk menanggapi hal itu, disusunlah bahan penyuluhan yang dituangkan dalam bentuk transparansi dan dalam berbagai kesempatan ditayangkan di depan para peserta yang disuluh atau diberi informasi. Bahan-bahan tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut. (Bahan-bahan itu sengaja ditulis dengan ejaan lama).

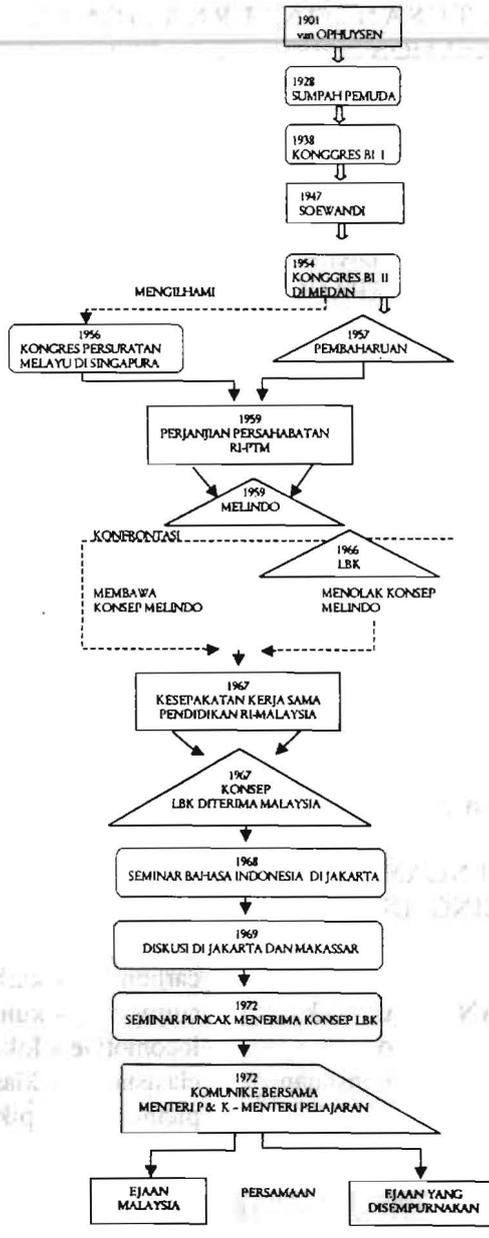
1. Perubahan Pemakaian Huruf dalam Konsep Edjaan yang Disempurnakan

dj	mendjadi	j	-	jalan, maju
j	mendjadi	y	-	yakin, saya
nj	mendjadi	ny	-	naynyi, hanyut
sj	mendjadi	sy	-	syarat, masyhur
tj	mendjadi	c	-	cara, suci
ch	mendjadi	kh	-	khas, akhir

2. Mengapa *dj* mendjadi *j* dan *j* mendjadi *y*

- 1) DIWASIATKAN OLEH KONGRES SOLO 1938 DAN KONGRES MEDAN 1954

BAGAN SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA DAN KERJA SAMA BAHASA ANTARA INDONESIA-MALAYSIA



KETERANGAN:

- kecapatan
- pertemuan bahasa
- konsep
- kesepakatan dua negara

- 2) DIPERGUNAKAN DALAM SISTEM "WORLD ORTHOGRAPHY" SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION
- 3) MENINGGAT TREND INTERNASIONAL: DALAM PENJUSUNAN EDJAAN UNTUK BAHASA2 NEGARA BERKEMBANG SELALU DIPERGUNAKAN J UNTUK (DJ) DAN Y UNTUK (J)
- 4) J DIPAKAI DALAM BAHASA INGGRIS DAN DJEPANG Y DIPAKAI DALAM BAHASA INGGRIS, PRANTJIS, SPANJOL, DJEPANG, ITALI, DSBNJA.

3. *c* sebagai pengganti *tj*

- 1) SUDAH MENDJADI KEBIASAAN DALAM PENULISAN BAHASA-BAHASA DJAWA KUNO, SUNDA KUNO, MELAJU KUNO, DAN SANSKERTA DALAM HURUF LATIN, MIS. CATUR, PANCASILA.
- 2) DIUSULKAN OLEH INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION
- 3) TIDAK MENJALAHI KONVENSI DJENEWA TENTANG TATA NAMA KIMIA.
- 4) LAZIM PULA DIPAKAI DALAM BEBERAPA BAHASA LAIN DI DUNIA.

4. Penggunaan *c*

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KOMISI ISTILAH 1958 KATA-KATA ASING DENGAN C DI INDONESIA SEBAGAI BERIKUT:

C DIDEPAN	a	carbon	- karbon
	u k	cultus	- kultus
	o	locomotive	- lokomotif
	konsonan	clasia	- klasik
		picnic	- piknik

ACHIR SUKU KATA

	i	civil	-	sipil
C DIDEPAN	s	cent	-	sen
	e			

DJADI HURUF C ADALAH HURUF IJANG TIDAK PRODUKTIF; DAN INI DIBERI NILAI BARU DALAM EYD. KATA KATA ASING DENGAN HURUF C DIUTJAPKAN SEPERTI DALAM BAHASA ASLINJA

COCA COLA - KOKA KOLA

5. Mengapa *ch* seperti dalam bahasa Inggris tidak dipakai?

[C]	[S]	[K]	[X]
Chair	Chaise	Chaos	Loch
Choice	Sachet	Choir	Bach
China	Chicago	Chronic	
Much	Machine	Orchid	
Lich	Parachute	School	

6. Perubahan edjaan Malaysia jika mereka menerima konsep kita

ch	mendjadi	c	churi	---	curi
sh	mendjadi	sy	sharat	---	syarat
o	mendjadi	u	burong	---	burung
e	mendjadi	i	kaseh	---	kasih
ayer	mendjadi	air			
tanda hubung	"-----"	hilang			
	di-mana	---	di mana		
sa	mendjadi	se	sa-buah	----	sebuah
ka	mendjadi	ke	ka-mana	----	kemana
			sa-sunggoh-nya	----	sesungguhnya

7. Lambang-lambang kimia

LAMBANG-LAMBANG KIMIA TIDAK BERUBAH
WALAUPUN TJARA MEMBATJANJA BERUBAH
INGGRIS CALCIUM IND. KALSIUM
LAMBANGNJA Ca(DIBATJA : Tje-a)

INI DIIZINKAN OLEH KONVENSI DJENAWA
TENTANG TATA NAMA KIMIA

BANDINGKAN:

BELANDA : FOSFOR
(INI EDJAAN RESMI)

LAMBANGNJA: P

8. Penertiban penulisan kata

KATA JADIAN
SERANGKAI

antarnegara
prasedjarah
swasembada
tunanetra
pantjasila
dasawarsa

KATA MAJEMUK
TERPISAH

meja tulis
peri kelakuan
kereta api cepat luar biasa
sembilan ribu tujuh ratus tujuh
puluh

KECUALI

matahari
bumiputra
syahbandar
peribahasa
hulubalang

PERHATIKAN

perkeretaapian
mempertanggungjawabkan
keluarbiasaan

sepuluh ribuan
berkereta api

9. Perubahan edjaan bahasa Belanda

Awal abad 13

Forchta in bivonga quâmon overmi, in bethecoda mi thuisternussi.
(Vroes en beving kwamen over mij en bedekte mij duisternis).

Achir Abad 13

Het sulen teken gescin in der sonnen ende in der mane ende in de sterren.
(Het zullen teken gezien in de zon en in de maan en in de sterren).

Abad 16

Ic heete de Doot, die onvoorsien elcx herte can straelen.
(Ik heet de Dood, die onvoorzien elk hart kan stralen).

Abad 19

Kekatjauan pemakaian antara
De Nederlandsche regeering Dan
De Nederlandse regering.

Abad 20 (1946)

De Nederlandse regering (Tetapi. Indonesisch) kultur.

10. Perubahan edjaan bahasa Inggris

- 1200: Icc hafe sammnedd o piss boc patt sinndenn o pe messeboc
- 1387: Ther was also a Nonne, a Prioresse, that of hir smyling was ful simple and coy.
- 1545: He that wyll wryte well in aany tonque, muste folowe thys councel of Aristotle.
- 1582: For casie obtaining is enemie to iudgement, not onlie in words, and naturall speche, but in greater matters, and verie important.
- 1645: That we do not pronaounse as we write, wich proceeds from divers superfluous letters, that occur in many of our words, which adds to the difficulty of the laanguage.

11. Edjaan Soewandi

- 1) BARU MERUPAKAN LANGKAH PERTAMA DALAM USAHA PENJEMPURNAAN EDJAN
- 2) TIDAK MEMBERI KEDUDUKAN RESMI PADA LAMBANG-LAAMBANG (HURUF) JANG HIDUP DALAM MASJARAKAT JAITU: F, Z, CH DAN SJ

BANDINGKAN:

FOLIO	DENGAN	POLIO
FAKTA		PAKTA
SENI		ZENI
SARAT		SJARAT
KAS		KHAS

3) BELUM TJUKUP MENGATUR PENGGUNAAN TANDA
BATJA

4) TIDAK ADA KAIDAH PENULISAN KATA
PERHATIKAN: TATA USAHA
TATAUSAHA
TATA-USAHA

12. Edjaan jang simpang siur

aktif	aktip
raya	raja
jaya	djaja, djaya
karya	karja, carja, carya
candra	chandra, tjandra

13. Kekurangan edjaan jang sekarang

1) EDJAAN JANG KITA PAKAI SEKARANG TIDAK
MENGATUR PEMAKAIAN HURUF-HURUF f, ch, sj dan
z SETJARA RESMI

BANDINGKAN:

folio	DENGAN	polio
fakta		pakta
seni		zeni
sarat		sjarat
kas		chas

- 2) PEMAKAIAN HURUF Y DAN V PERLU DJUGA KITA RESMIKAN.
- karya
 - jaya
 - yogyakarta
 - varia
 - universitas
 - vokal
- 3) EDJAN JANG KITA PAKAI SEKARANG BELUM TJUKUP MENGAATUR PENGGUNAAN TANDA BATJA

14. Kekacauan penulisan kata-kata Arab

hadir	hadlir	hadhir
asas	azas	
rahmat	rachmat	
sjahid	sahid	
rela	ridho	ridlo, ridla
insaf	insjaf	

15. Mengapa perlu penjempurnaan edjaan?

- 1) SUDAH LAMA BAHASA INDONESIA DALAM KEADAAN SIMPANG SIUR.
- 2) KAIDAH EDJAN JANG BERLAKU SEKARANG TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA.

- 3) EDJAN SUWANDI SEBAGAI EDJAN JANG RESMI SUDAH TIDAK DITAATI LAGI SEPENUHNJA.
- 4) EDJAN SUWANDI TIDAK MENGATUR PENULISAN KATA-KATA.

IV. Penutup

Dari pengalaman menyebarkan konsep sistem ejaan yang baru sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1972, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah meminta tenaga, waktu, kiat, dan terutama kemampuan ilmiah, serta teknik komunikasi, yang semuanya itu dituangkan dalam satu perencanaan terpadu. Kiat penyampaian persoalan yang tampak lebih komunikatif ialah bahwa di samping persoalan tetap disajikan secara ilmiah sebaiknya dibungkus dengan cara santai atau populer, bila perlu disertai humor; tidak secara kaku sampai mengerutkan kening berkali-kali; tidak bersulit-sulit dengan memakai bahasa atau ungkapan yang berat-berat yang sebenarnya dapat dinyatakan dengan kata atau kalimat sederhana. Seperti dikatakan oleh orang-orang arif, "Janganlah menyulitkan yang mudah-mudah, tetapi mudahkanlah yang sulit-sulit." Oleh karena itu, banyak penyuluh yang memberikan keterangan dalam penyuluhan untuk masyarakat umum tentang fonem tidak memakai tanda-tanda yang lazim dipakai dalam linguistik seperti //, [], dan {}. Pernah terjadi dalam diskusi PWI Jakarta tahun 1967, seorang penanggap menganggap bahwa huruf-huruf dalam tanda kurung siku sebagai huruf baru. Hal itu dapat dipahami karena tidak terlalu banyak orang yang sudah mengetahui lambang dan tanda-tanda linguistik tersebut. Pemudahan tanda-tanda linguistik seperti itu tentulah hanya untuk penyuluhan itu saja sampai batas-batas tertentu.

Tanggapan yang terdapat dalam buku ini memang memang ada beberapa yang bertolak dari ucapan penulis sendiri, sebagai penjelasan sebelumnya dalam ceramah yang diminta oleh Dewan Kesenian Jakarta (1972). Dari situlah para sastrawan, bahasawan, wartawan, dan pecinta bahasa lazimnya mengeluarkan tanggapan mereka secara meluas dalam surat-surat kabar berupa tajuk rencana, pemuatan artikel, komentar, dan

sajak serta karikatur dengan nuansanya, majalah, radio, dan televisi. Semua tanggapan atau sumber penjelasan pada masa itu dituliskan oleh pengarangnya dalam ejaan lama (sebelum disempurnakan).

Di samping itu, seorang penyuluh hendaknya jangan sampai buta politik walaupun tidak harus aktif dalam politik. Kesalahan ucapan yang cenderung kepada sengketa politik seperti soal SARA yang dapat menimbulkan perpecahan, tentu saja harus dihindari.

Demikianlah isi buku yang sebenarnya sangat sederhana dan belum lengkap ini penulis sampaikan kepada pembaca, peminat, dan pembina bahasa nasional kita.

Semoga ada gunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Lukman (Ed)

- 1967 *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*. Djakarta: Gunung Agung.
- 1972 "Usaha Penyempurnaan Edjaan dalam Rangka Pembakuan Bahasa Indonesia." *Budaja*, Seri Khusus No. 9, 1972.
- 1996 *Lurah Taker*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Kentjono, Djoko.

- 1967 "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia." dalam *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*. Djakarta: Gunung Agung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1973 *Dokumentasi Pelaksanaan Edjaan jang Disempurnakan*. Djakarta: Direktorat Djenderal Kebudayaan.

Ejaan Bahasa Indonesia, Sejarah Singkat.

- 1972 "Bahasa dan Kesusastraan" *Seri Khusus*, No. 9, 1972. Djakarta: Lembaga Bahasa Nasional, Direktorat Djenderal Kebudayaan.

Halim, Amran

- 1974 "Edjaan jang Disempurnakan dan Perkembangan Ilmu Bahasa." Dalam *Supra*, Djajanto dan Lake, Anton (Ed.) *Seminar Bahasa Indonesia 1972*. Flores: Nusa Indah

Kridalaksana, Harimurti

1972 "Pembaharuan Ejaan 1972" Tahap dalam Proses Pembakuan bahasa Indonesia. Makalah untuk Konferensi ASANAL, Manila, 1974. Diterjemahkan oleh Soenarjati Djajanegara dari bahasa Inggris.

1991 *Masa Lampau bahasa Indonesia sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Kanisius.

Latief, A.

1983 "Suatu tinjauan Perkembangan Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan." Dalam *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 471--480.

1971 "Lafal dan Ejaan". Dalam Seminar Bahasa Indonesia 1968. Ende: Nusa Indah, hlm. 44--54.

Le Roux, C.C.F.M.

1929 "*De Elcano's Tocht door Timorarchipel met Magelhaen's Schip Victoria*" *Pigafetta's Maleische-woordenlijst*. (*Vocabuli de Questi populi Mori*). Dalam: Feestbundel, jilid II Weltevreden. G. Kolff & Co.

Moeliono, Anton M.

1981 *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan, Seri ILDEP.

Ophuijsen, Ch. A. van

1921 *Kitab Logat Melajoe*. Woordenlijst voor de Spelling der Maleische Taal met Latijnsche Karakter. Weltevreden. N.V. Mitg--"Paapyrus". Cetakan ketujuh.

Roman, Joannes

1674 *Grondt ofte Kort Bericht van de Maleysche Tale.*
Amsterdam.

Samsuri

1960 "*Sistem Fonem Bahasa Indonesia dan Suatu Penyusunan Edjaan Baru.*" Dalam: Medan Ilmu Pengetahuan, I, 4. 1960.

Vikør, Lars

1990 *Penyempurnaan Ejaan.* Pembahasan dan Pembaharuan Ejaan di Indonesia dan Malaysia 1900--1972. Jakarta: Intermasa.

Shanmugam, S.V.

1929 *Indonesian Studies.* Indian Council for Cultural Relations Azad Bhavan Indraprastha Estate. New Delhi.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 03/a.i/72

tentang

Pembentukan Panitia Pelaksana Edjaan
Bahasa Indonesia jang Disempurnakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Mei 1972 No.: 069a/U/1972. maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Edjaan Bahasa Indonesia jang disempurnakan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.183/1998;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17/M/1968;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Mei 1972 No.069a/U/1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : membentuk "panitia pelaksana edjaan bahasa Indonesia jang Disempurnakan", selanjutnya dalam Keputusan ini disebut " Panitia Pelaksana", jang mempunyai tugas-tugas membantu Direktur Djenderal Kebudayaan untuk :

- Menjiapkan rentjana pelaksanaan edjaan bahasa Indonesia jang disempurnakan.
- Memperlantjar pelaksanaan edjaan Bahasa Indonesia jang disempurnakan setelah diresmikan.

KEDUA : (1) Panitia Pelaksanaan tersebut dalam pasal "Pertama" terdiri dari :

a. Koordinasi/Wakil Koordinator

b. Kelompok2 :

1. Sekretariat

2. Teknis Bahasa

3. Perentjanaan

4. Logistik

5. Penerangan

6. Pembinaan

7. Hubungan

8. C h u s u s.

c. Seksi2 pada Kelompok Sekretariat :

1. Seksi Materiil/Keuangan

2. Seksi Per-Undang2an

3. Seksi Tata Usaha,

sebagai tersusun dalam bagan pada Lampiran I Keputusan ini.

(2) Susunan nama-nama serta kedudukan anggota Panitia Pelaksana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, sebagai termuat pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Memberi wewenang kepada Ketua Kelompok Sekretaris untuk mengangkat pembantu-pembantu staf Sekretariat menurut keperluan.

KEEMPAT : Mereka tersebut pada pasal "Kedua" dan jang diangkat berdasarkan ketentuan tersebut pada pasal "Ketiga" masing-masing :

a. jang mengadakan perdjalan (keluar kota) untuk keperluan Panitia Pelaksana harus mempunyai surat perintah djalan jang ditanda tangani oleh Direktur Djenderal Kebudajaan atau pedjabat jang ditundjuk untuk keperluan itu.

b. jang menghadiri sidang dan mengadakan perdjalan jang tidak dapat disediakan kendaraan Pemerintah dan jang tidak berhak meminta penggantian tundjangan uang kilometer diberikan penggantian ongkos perdjalan setempat atas pengeluaran jang sebenarnja jang disjahkan oleh Ketua Panitia.

- c. diberikan insentif jang besarnja akan ditentukan kemudian.

KELIMA : Biaja untok keperluan :

- a. tersebut pada pasal " Keempat" sub a;
- b. tersebut pada pasal " Keempat" sub b dan sub c;
- c. penjelenggaraan rapat-rapat penjelenggaraan tata usaha Panitia, alat-alat;

masing-masing dibebankan pada mata anggaran :

- a. 16. 1. 1. 401.
- b. 16. 1. 1. 284.

dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1972/1973 dan untok tahun-tahun selanjutnja dibebankan pada mata anggaran jang selaras dengan itu.

KEENAM : Panitia Pelaksana diwadjabkan untok :

- a. Memberikan laporan tiga bulan sekali hasil tugasnja;
- b. Satu minggu setelah menjelesaikan tugasnja memberikan laporan serta pertanggungngan djawab termasuk pertanggungngan djawab keuangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KETUDJUJH : Hal-hal lain jang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih landjut dalam Keputusan tersendiri.

KEDELAPAN : keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal : 20 Mei 1972.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
u.b.

DIREKTORAT DJENDERAL KEBUDAJAAN,

Salinana : l.s.b.

ttd.

Prof. Dr. Mantra.

SALINAN kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri
5. Sekdjen. Dep. P. dan K.
6. Semua Dirdjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.
7. B. P. P. pada Dep. P. dan K.
8. Inspektur Djenderal Dep. P. dan K.
9. Semua Sekretaris Ditdjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.
10. Semua Direktur, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P. N. dalam lingkungan Dep. P. dan K.
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi.
12. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
13. Semua Kepala Perwakilan Dep. P. dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Padjak.
16. Direktorat Djenderal Anggaran.
17. Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Kantor Urusan Pegawai,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah,
21. L. I. P. I.
22. BAPPENAS.
23. Biro Pusat Statistik.
24. Lembaga Administrasi Negara.

Lampiran II Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal, 20 Mei 1972.No.03/A.I/72

Daftar Susunan nama/Kedudukan Anggota.

1. Direktorat Djenderal Kebudayaan - Ketua / Koordinator
 2. Sekretaris Direktorat Djenderal
Kebudayaan - Wakil Ketua/Koordinator
 3. Kepala Lembaga Bahasa Nasional - Wakil Ketua/Koordinator.
- I. Kelompok Sekretariat
1. Drs. Alip Soebagijo - Dit.Djen. Kebudayaan - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
 2. Soemarsis - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota;
 3. Sutarso S.H. - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota;
- II. Kelompok Teknis Bahasa.
1. Drs. Lukman Ali - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok;
 2. Dra. Nj. S.W.Rudjiati Muljadi. - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota.
 3. Drs. Djoko Kentjono - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota.
 4. Drs. B. Suhardi - Konsorsium Ilmu2 So - sebagai anggota.
 5. Drs. H.E. Harimurti Kridalaksana - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota.
 6. Drs. S. Effendi - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota.
 7. Dr. Dahnil Adnani - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota.
- III. Kelompok Perentjanaan.
1. Drs. Soewojo S. Adi - T.P.O.P - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
 2. Idris M.T. Hutapea - Dep.P.danK. - sebagai anggota.
 3. Drs. M. Hussin M.Sc. - B.P.P. - sebagai anggota.

IV. Kelompok Logistik.

1. Drs. P. Wajong - Dit.Djen.Kebudayaan - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
2. Kurnia Yahya - Projek Paket Buku - sebagai anggota.
3. Drs. Soedjono - Projek Paket Buku SD - sebagai anggota.
4. Sofjan Ismail -Dit.Djen.Kebudayaan-sebagai anggota.

V. Kelompok Penerangan.

1. Dharsono S.H. - Dept.P.dan K. - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
2. D.Khumarga S.H. - SATGAS MASS - sebagai anggota MEDIA KOPKAMTIB.
3. Drs. E. Siswojo - Dep. Penerangan - sebagai anggota.
4. Wahab Ismail - Dep. Penerangan - sebagai anggota.
5. Drs. Suratno -Dept. P. dan K. - sebagai anggota.

VI. Kelompok Pembinaan

1. Drs. Fuad Salim M.A. - Dit. Djen. Pendidikan - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
2. Kusnadi - Direktorat Pend. - sebagai anggota.
Hardjasumantri S.H. Tinggi
3. Let. Kol. Sampurno S.H. - Dit. Pend. Kesenian - sebagai anggota.
4. Drs. Ibnu Slamet - Dit. Pend. Olah Raga - sebagai anggota.
dan Pemuda
5. Drs. T. Pasaribu - Dept. P. dan K. - sebagai anggota.
6. Sdr. Mustafa - Dit.Djen. Pendidikan - sebagai anggota.

VII. Kelompok Hubungan.

1. Drs. Sihite - Dep. P. dan K. - sebagai anggota merangkap Ketua Kelompok.
2. M. Sudjiman L.L.M. - Dep. P. dan K. - sebagai anggota.
3. Major T.S. Goentojo - G.I/Intel Hankam - sebagai anggota.
4. Nahar Sjamsuddin - Dep. Luar Negeri - sebagai anggota.
5. Drs. Amron - Dept. Agama - sebagai anggota

- 6. Drs. T.M. Pardede - Dept. Dalam Negeri - sebagai anggota.
- 7. Drs. Soewarno - Dep. Dalam Negeri - sebagai anggota.
- 8. Wakil Sekretariat Negara - Sekretariat Negara - sebagai anggota

VIII. Kelompok Khusus.

- 1. Gandjar Angkawidjaja - Sebagai Ketua Kelompok.
- 2. Kol. Drs. Santosa - sebagai anggota.
- 3. Letkol. Dr. Pangestuhadi Sk. - sebagai anggota.
- 4. A.K.B.P. Drs. Suparto - sebagai anggota.
- 5. Kpt. Drs. Didi Mukahardanto - sebagai anggota.
- 6. Ip. I Drs. Suseno Harsono - sebagai anggota.
- 7. S. P. Sembiring - sebagai anggota.

DIREKTUR DJENDERAL KEBUDAJAAN,

ttt.

PROF. DR. MANTRA.

KOMUNIKE BERSAMA

Dalam rangka kunjungan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1972 telah diadakan pertemuan antara:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, MASHURI, beserta staf, dan
- b. Menteri pelajaran kerajaan malaysia, ENCHE HUSSEIN ONN, beserta staf,

yang telah menghasilkan Persetudjuan Bersama yang meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- I. Dalam rangka usaha bersama pengembangan bahasa nasional masing-masing, yang meliputi masalah-masalah : a. edjaan, b. istilah dan c. tata-bahasa, kedua Pemerintah menyetudjui untuk:
 1. melaksanakan djiwa persetudjuan para ahli kedua Negara pada tanggal 27 Djuni 1967, tentang edjaan yang telah disempurnakan;
 2. meresmikan berlakunja edjaan tersebut dengan surat keputusan Menteri masing-masing, pada waktu yang bersamaan dan mengumumkannja pada waktu yang bersamaan pula ;
 3. membentuk Panitia Tetap Bersama tentang pengembangan bahasa nasional masing-masing, yang akan mengadakan pertemuan2 berkala dikedua Negara setjara bergilir; Panitia tersebut sudah harus bersidang selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1972 ditempat yang ditetapkan bersama ;
 4. melindungi dan menghormati hak tjipta pengarang2 dari masing-masing Negara dan untuk itu membentuk Panitia Tetap Bersama Hak Tjipta yang sudah harus bersidang selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember 1972.
- II. Dalam rangka mengembangkan kerdja sama dibidang pendidikan kedua Pemerintah menyetudjui untuk menjusun suatu program djangka pandjang yang meliputi antara lain pengiriman tenaga

- pengadjar ditingkat perguruan menengah dan perguruan tinggi, pengiriman siswa/mahasiswa serta pengiriman tenaga-tenaga peneliti.
- III. Dalam rangka pengiriman tenaga pengadjar dan peneliti kedua Pemerintah menyetudjui untuk memperlakukan persjaratan sama dengan pengadjar dan peneliti setempat jang sama statusnja.
 - IV. Dalam rangka pengiriman tenaga pengadjar, peneliti dan mahasiswa, kedua Pemerintah menyetudjui untuk selalu menempuh prosedur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipihak Indonesia dan Kementerian Pelajaran serta Universiti2 dipihak Malaysia.
 - V. Dalam rangka pertukaran pengalaman antara para pegawai utama kedua Negara, kedua Pemerintah menyetudjui untuk menjelenggarakan kundjungan-kundjungan berkala setjara bergilir dari pegawai-pegawai utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia.

Djakarta, 23 Mei 1972.

**MENTERI PELAJARAN
KERAJAAN MALAYSIA,**

**MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

ttd.

HUSSEIN ONN

MASHURI

POKOK-POKOK PENJELASAN MENTERI P DAN K DALAM SIDANG KABINET 1 AGUSTUS 1998

Mengapa Perlu Dilakukan Penyempurnaan Ejaan?

Dalam rangka menjunjung amanat Sumpah Pemuda 1928 kami ingin mengadakan langkah-langkah pembinaan bahasa Indonesia dengan dasar-dasar yang sistematis. Langkah-langkah itu kami lakukan dengan mengadakan standardisasi tata bahasa, standardisasi peristilahan, dan standardisasi ejaan. Standardisasi ejaan kami beri prioritas pelaksanaannya, karena:

1. standardisasi ejaan adalah landasan dari standardisasi tata bahasa dan peristilahan, artinya kaidah-kaidah tata bahasa dan lebih-lebih kaidah-kaidah peristilahan tak dapat disusun bila soal-soal ejaan belum diselesaikan;
2. sistem ejaan bahasa Indonesia berfungsi sebagai penyaring terhadap pengaruh bahasa lain, artinya suatu unsur bahasa belum dapat dianggap sebagai unsur Indonesia bila ejaan belum diindonesiakan (perhatikan misalnya kata-kata seperti *file*, *team*, *unit*, *briefing*, *upgrading* dan sebagainya tetap dianggap sebagai unsur asing, karena ejaannya masih asing);
3. standardisasi ejaan dalam prakteknya lebih mudah dilaksanakan dan tidak makan banyak waktu.

Adalah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan standardisasi ejaan secepat mungkin, supaya tidak terlambat seperti halnya bahasa Inggris. Seperti kita ketahui, bahasa Inggris sekarang ini mempunyai ejaan yang sangat ruwet, karena lebih kurang 200 tahun yang lalu Inggris menyalahkan kesempatan untuk mengadakan standardisasi ejaannya. Memang pernah ada usaha-usaha untuk menertibkan ejaan bahasa Inggris, tetapi tak satupun berhasil, karena terlambat. Kita tidak ingin hal semacam ini terjadi atas ejaan bahasa Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan apakah yang mendorong standardisasi ejaan bahasa kita?

Pertama, sudah lama bahasa Indonesia ada dalam keadaan simpang siur. Hal ini tercermin dalam tata bahasanya, dalam peristilahannya dan lebih-lebih dalam ejaannya.

Perhatikan kekacauan antara:

aktif	aktip
raya	raja
jaya	djaja, djaya
karya	karja, carja, carya
candra	chandra, tjandra, tjandra

Kedua, kaidah ejaan yang resmi, yakni Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik, tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa Indonesia, karena di samping baru merupakan langkah pertama dalam usaha penyempurnaan ejaan, juga karena Ejaan Soewandi tidak memberi kedudukan resmi pada lambang-lambang (huruf) yang hidup dalam masyarakat, yaitu : F, V, CH, dan SJ.

Bandingkan :

folio	polio
fakta	pakta
kafan	kapan
vak	pak
sarat	sjarat
kas	chas

Seerti kita ketahui semua, huruf -huruf CH dan SJ akan diganti dengan KH dan SY, dengan alasan-alasan yang akan kami jelaskan kemudian.

Ketiga, secara teknis yang dimaksud dengan ejaan ialah *penulisan huruf, penulisan kata dan penulisan tanda baca*. Ejaan Soewandi hanya mengatur penulisan huruf saja; penulisan kata dan pemakaian tanda baca samasekali tidak diatur. Perhatikanlah kecacauan di antara:

- tata usaha
- tatausaha
- tata-usaha

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 062/1997.-

tentang

**MENGESAHAN ADANJA
PANITIA EDJAAAN BAHASA INDONESIA.**

-jud-

Telah mebatja :

- a. Surat Sdr. Direktur Djenderal Kebudayaan jang ditudjukan kepada kami tanggal 6 Djuni 1967 No. 275/D-2/67 tentang "Panitia Edjaan";
- b. Surat Sdr. Pd. Sekretaris Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Direktorat Djenderal Kebudayaan jang ditudjukan kepada Sdr. Kepala Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Direktorat Djenderal Kebudayaan tanggal 15 Djuni 1967 No. 623/II B/Bi/67 tentang "s.k. Panitia Edjaan Dep. P. dan K."

Menimbang :

- a. bahwa pada edjaan Bahasa Indonesia jang sekarang berlaku dan dipergunakan, masih terdapat kekurang-kekurangan dalam hal mentjerminkan kodrat Bahasa Indonesia;
- b. bahwa kemadjuan Ilmu Bahasa telah memberikan patokan-patokan baru bagi penjusunan edjaan jang baik;
- c. bahwa perlu adanya kodifikasi pemakaian huruf dan tanda batja jang berlaku untuk seluruh Indonesia;
- d. bahwa dalam kenjataanja perkembangan Bahasa Indonesia telah sedemikian rupa, sehingga telah memberi gambaran akan pentingnja peranan Bahasa Indonesia di Asia Tenggara chususnja dan seluruh dunia umumnja;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu dalam rangka pembinaan Bahasa Indonesia chususnja dan pembinaan Kebudayaan Indonesia umumnja, perlu segera menjempurnakan edjaan Bahasa Indonesia sehingga memenuhi kebutuhan teknis dan praktis serta

- memenuhi pensjaratan ilmiah dan tidak memberikan pembebanan ekonomi;
- f. bahwa untuk keperluan tersebut pada sub e telah dibentuk setjara tidak resmi suatu Panitia dengan nama "Panitia Edjaan L.B.K." jang telah mulai bekerdja sedjak tanggal 7 Mei 1966;
 - g. bahwa agar supaja Panitia tersebut pada sub f dapat mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan tugasnja, dipandang perlu mengesahkan pembentukan Panitia tersebut setelah diubah namanja mendjadi "Panitia Edjaan Bahasa Indonesia".

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 163 tahun 1966;
 - 2. No. 170 tahun 1966;
 - 3. No. 173 tahun 1966;
- b. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Maret 1965 No. Aa/C/15/1965;
- c. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KER/11/1966;
- d. Keputusan Presidium Kabinrt tanggal 3 Djuli 1967 No. 157/U/KEP/7/1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membubarkan Panitia Pembaharuan Edjaan Bahasa Indonesia jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 19 Djuli 1956, dengan utjapan terima kasih kepada para anggota Panitia tersebut atas djasa-djasa jang telah ditjorahkan kepada Panitia tersebut.
- Kedua : Mengesahkan adanja "Panitia Edjaan L.B.K." jang telah mulai bekerdja sedjak tanggal 7 Mei 1966, setelah diubah namanja mendjadi "Panitia Edjaan Bahasa Indonesia", jang bertugas untuk menjusun suatu edjaan baru jang dapat menggambarkan kodrat Bahasa Indonesia

sehingga memenuhi kebutuhan teknis dan praktis serta memenuhi pensjaratan ilmiah, dan tidak memberatkan pembebanan ekonomi yang terdiri dari mereka tersebut dibawah ini :

1. Sdr. A.M. Moeliono, S.S., M.A.,
 - Lektor pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Sdr. Nj. S.W. Rudiati Muljadi, S.S.,
 - dari Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Direktorat Djenderal Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sdr. Sri Timur Suratman, S.S.,
 - dari Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Direktorat Djenderal Kebudayaan, sebagai Sekretaris I merangkap anggota;
4. Sdr. Basuki Suhardi, S.S.,
 - Lektor Muda pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sebagai Sekretaris II merangkap anggota;
5. Sdr. Djoko Kentjono, M.A.,
 - Lektor Muda pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sebagai anggota,
6. Sdr. Lukman Ali, S.S.,
 - dari Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Direktorat Djenderal Kebudayaan, sebagai anggota;
7. Sdr. H.E. Harimurti Kridalaksana, S.S.;
 - Lektor Muda pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sebagai anggota;
8. Sdr. S. Effendi, S.S.,
 - dari Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Direktorat Djenderal Kebudayaan, sebagai anggota;

dengan ketentuan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1967:

- a. Sdr. Sri Timur Suratman, S.S. tersebut pada angka 3, mengundurkan diri dari Panitia Edjaan Bahasa Indonesia berhubung dengan tugas mengadjar di Universitas Hamburg (Republik Federal Djerman);
- b. Sdr. Basuki Suhardi, S.S. tersebut pada angka 4, diubah kedudukannja mendjadi Sekretaris I merangkap anggota untuk menggantikan Sdr. Sri Timur Suratman, S.S. tersebut.

Ketiga : Dengan adanja pengesahan sebagaimana tersebut pada pasal "Kedua", anggota Panitia Edjaan Bahasa Indonesia terhitung mulai bekerdja Panitia Edjaan L.B.K. :

- a. Masing-masing jang menghadiri sidang (dalam kota) jang tidak dapat disediakan kendaraan Pemerintah dan jang tidak berhak meminta penggantian tundjangan uang kilometer, diberikan uang penggantian ongkos djalan setempat atas dasar pengeluaran jang sebenarnja setelah disahkan oleh Ketua Panitia Edjaan Bahasa Indonesia;
- b. Masing-masing diberikan uang sidang sebesar tersebut pada pasal 1 ayat (3) Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Maret 1965 No. Aa/C/15/1965 untuk tiap kali hadir dalam satu sidang dan sebanjak-banjaknja dua kali sidang dalam satu hari.

Dengan ketentuan bahwa terhidung mulai tanggal 1 April 1967, pemeberian uang sidang tersebut diubah mendjadi pemberian honorarium/uang djasa setiap bulannja sebesar tersebut pada pasal "kedua" jo pasal "Kedelapan" keputusan Presidum Kabinet tanggal 3 Djuli 1967 No. 157/U/KEP/7/1967.

Keempat : Biaja untuk keperluan :

- a. Tersebut pada pasal "Ketiga" sub a;
- b. Tersebut pada pasal "Ketiga" sub b;
- c. Administrasi dan lain keperluan sidang;

masing-masing dibebankan pada mata anggaran:

- a. 14. 1. 2. 401;
- b. 14. 1. 2. 201; (sedjak pemberian uang sidang diubah mendjadi pemberian honorarium/uang djasa, mendjadi 14. 1. 2. 006);
- c. 14. 1. 2. 201,
dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa ketentuan tersebut pada :

- a. Pasal "Pertama" dan "Kedua" ketjuali alinea terachir;
- b. Pasal "Kedua" alinea terachir;
- c. Pasal "Ketiga" ketjuali alinea terachir;
- d. Pasal "Ketiga" alinea terachir;
- e. Pasal "Keempat" ketjuali sub b setelah pemberian uang sidang diubah mendjadi pemberian honorarium/uang djasa;
- f. Pasal "Keempat" sub b setelah pemberian uang sidang diubah menndjadi pemberian honorarium/uang djasa,

masing-masing berlaku surut terhtung mulai:

- a. tanggal 7 Mei 1966;
- b. tanggal 1 Djuni 1967;
- c. tanggal 7 Mei 1966;
- d. tanggal 1 April 1967;
- e. tanggal 1 Djanuari 1967;
- f. tanggal 1 April 1967.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 19 September 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TTD.

(Sarino Mangunpranoto)

SALINAN KEPADA:

1. Sekretariat negara,
2. Sekretariat presidium kabinet,
3. Semua terutama,
4. Semua menteri,
5. Sekdjen, Dep. P. dan K.,
6. Semua Dirdjen. dlm. lingkungan Dep. P. dan K.,
7. Sekretariat Menteri P. dan K.,
8. Semua Sekretaris Ditjen. dlm. Lingkungan Dep. P. dan K.,
9. Semua Direktorat, Biro Lembaga dan P.N. dlm. lingkungan Dep. P. dan K.
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Perbendaharaan Negara,
12. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
13. Direktorat Perdjalanan,
14. Direktorat Pajak,
15. Jang bersangkutan untuk seperlunya.

**USAHA PENJEMPURNAAN EDJAAN
DALAM RANGKA PEMBAKUAN BARASA INDONESIA**

Lukman Ali

(Tjeramah bahasa di Taman Ismail Mardjuki Djakarta,
tanggal 4 Pebruari 1972)

Masalah Pembakuan (standardisasi)

Sering sudah kita mendengar keluhan-keluhan dalam masjarakat mengenai gawatnja keadaan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita jang telah di kukuhkan dalam UUD 45. Sematjam rasa tak puas telah berkembang sedjak lama. Telitilah setiap hasil diskusi, seminar, simposium, tjeramah ataupun tulisan-tulisan dalam koran, madjalah dan sebagainya, maka kita akan menemukan rasa tak puas itu dengan djelas. Ketidak puasan ini kemudian mendorong lahirnja kesimpulan dan keputusan agar pembinaan bahasa Indonesia sebagai salah satu usaha dalam rangka pengembangan kebudayaan Indonesia, hendaklah di lakukan sungguh-sungguh dan terus menerus setjara terencana hingga bahasa Indonesia itu dapat berpungsi dengan baik sebagai alat komunikasi dalam pergaulan antara suku bangsa, alat administrasi pemerintah dan sebagai alat untuk pengantar ilmu dan kebudajaan jang semuanja itu tak dapat di pisahkan--bahkan merupakan faktor penting--dari kegiatan pembangunan kita dewasa ini.

Keluhan masjarakat mengenai keadaan bahasa indonesia jang parah itu d'elas tidak hanja datang dari pihak para ahli bahasa sadja tetapi djuga dari pihak diluar itu jang sebagai pemakai bahasa terlibat dalam kegiatannja se-hari-hari berkomunikasi dengan orang atau masjarakat di luar diran' ja, sepe rti guru-guru, pengarang-pengarang, wartawan, pedjabat, pemimpin, budajawan, seniman, politikus, dan sebagainya.

Keluhan itu semua merupakan tanda jang djelas, bahwa tidak terdapat sematjam kepuasan dalam berkomunikasi dengan memakai bahasa sebagai alatnja. ini disebabkan dua kemungkinan. Pertama, pemakai bahasa itu sendiri mungkin jang kurang kemampuannya menggunakan bahasa. Kedua, mungkin bahasa itu sendiri jang belum dikembangkan demikian rupa hingga dalam beberapa segi, bahasa itu belum dapat menampung konsep-konsep pikiran pemakai bahasa misalnja dalam hal istilah-istilah.

Saja teringat dalam hubungan ini tadjuk rentjana koran *Indonesia Raya* 14 Pebruari 1970 jang menjatakan antara lain betapa djahatnja akronim-akronim (Kata singkatan) jang di pakai setjara membabi buta jang dapat menimbulkan djurang antara pemerintah dan rakyat, antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hal ini dengan tegas di katakan oleh tadjuk tersebut bahwa surat-surat kabar merupakan pembuat dosa-dosa terbesar di samping djuga instansiinstansi resmi. Untuk menghemat sedikit ruangan djanganlah kita merusak bahasa Indonesia dengan akronim-akronim itu. Dan selandjutnja dianjurkan agar pers, radio dan televisi kembali memakai bahasa Indonesia jang djernih, baik dan dipahami oleh orang Indonesia. Dan hendaknja para wartawan, pembesar dan pengarang menghindari kebiasaan menjelipkan kata-kata asing, seperti dalam pidato dan keterangan resmi, sedang kata Indonesianja ada. Ini menimbulkan kesan seakan bahasa Indonesia adalah tambahan belaka.

Saja kira andjuran ini, jang di dalamnja djuga ditemukan unsur kritik diri sesama wartawan, pantas sekali kita perhatikan. Memang benar apa jang dikatakan koran tersebut. Perhatikanlah muntjulnja kata-kata singkatan jang mendjamur dewasa ini jang akibatnja lebih banjak menghambat komunikasi walaupun pentjiptaannya dimaksudkan untuk menghemat dan untuk melantjarkan komunikasi.

Demikian pula apa jang dikatakan orang tentang kebiasaan pedjabat dan pemimpin menjelipi utjapan-utjapannya dengan kata-kata asing sudah umum pula kita ketahui. Hal inipun tak kurang menjebabkan matjetnja komunikasi. Kita memang tak boleh bentji kepada kata-kata asing. Jang harus kita ingat ialah bahwa kita seharusnja dapat membedakan atau memilih kata-kata asing mana sadja jang memang dapat kita ambil demi

untuk memperkaja kosakata bahasa kita dan mana jang tidak perlu. Kata-kata seperti *pers*, *politik*, *ekonomi* umpamanja tidak perlu lagi kita tjarikan Indonesianja. Tetapi untuk kata-kata seperti *workingpaper*, *follor-up*, *upgrading*, *tackle*, *level*, *gap*, *approach*, *time-schedule*, *planning* dan *marketing*, tidak dapatkah dikatakan *kertas kerdja*, *tindak landjut*, *penataran*, *menangani*, *tingkat*., *djurang*, *pendekatan*, *djadwal*, *perentjanaan* dan *pemasaran*?

Pentjiptaan unsur-unsur baru dalam bahasa Indonesia seperti pembentukan istilah-istilah dalam bidang ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan memakai bahan jang sudah ada dalam bahasa sendiri maupun jang diambil dari bahasa asing. Dan bahan dari bahasa asing ini dapat diterdjemahkan tetapi dapat pula diambil (dipungut) kemudian disesuaikan edjaannya dengan edjaan bahasa Indonesia. Pekerdjaan pembentukan istilah ini sampai achir 1966 sebagian besar dilakukan selama ini oleh Komisi Istilah Dep. P. dan K. dan sebagian lagi oleh masjarakat di luar itu. Tetapi sebagai jang sudah saudara-saudara ketahui, sedjak awal 1967 komisi tersebut tidak bekerdja lagi karena tidak dibiayai lagi oleh Sekretariat Negara. Komisi Istilah ini setjara administratif berada di bawah Sekretariat Negara karena kedudukannya berupa panitia antar departemen. Koordinasi teknisnja berada di tangan Dep. P. dan K. (Lembaga Bahasa Nasional). Sampai achir 1966 Komisi Istilah ini sempat menghasilkan 330.000 istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Saja djadi teringat tulisan D.H. Assegaf dalam *Indonesia Raya* tanggal 28 Djanuari 1972 jang menjarankan agar Komisi Istilah mengembangkan Seksi Istilah Komunikasi, berhubung istilah-istilah dalam bidang ini hampir semuanya belum ada istilah Indonesianja seperti *lead*, *make-up*, *date-line*, *dead-line*, *off the record*, *on the record* dan sebagainya. Usul ini sangat simpatik tetapi sajang untuk sementara tentu terpaksa ditjatat sadsja dahulu sampai Komisi Istilah diaktifkan kembali. Dan mengenai ini setahu saja Dep. P. dan K. sudah memikirkankanny'la dalam rangka jang lebih luas jaitu dalam perentjanaan pembakuan bahasa setjara menjeluruh dalam waktu-waktu jang akan datang.

Peranan pers dan wartawan dalam usaha-usaha pembinaan bahasa nasional kita memang tak dapat dimungkiri pentingnya. Mereka telah

memberikan sumbangan-sumbangan jang njata umpamanja dengan untuk karangan atau pemitjaraan mengenai masalah bahasa. Dan lebih madju lagi ada koran jang menjediakan tempat khusus utuk maksud itu seperti jang dilakukan oleh *Kompas* dengan ruangan "Santun Bahasalnja dan *Sinar Harapan* dengan ruangan "Langgam Bahasa"nja. Begitupun ruangan kebudayaan dalam surat kabar dan madjalah lainnja tidak kurang pula djasanja hal ini seperti dalam Harian Kami, *Berita Yudha*, *Angkat:an Bèrsendjata*, *Abadi*, *Merdeka*, *Suara Karja*, *Indonesia Raja*, *Mahasiswa Indonesia*, *Basis*, *Budaja Djaja*, *Tempo*, *Ekspres* untuk sekadar menjebut beberapa nama. Belum disebut pula koran dan madjalah jang terbit di daerah-daerah. Tidak pula dapat dilupakan turun tangannja para pemimpin redaksi-jang tidak hanja menerima dan memuat karangan jang masuk--dengan menundjukkan masalah bahasa. Ini bukti jang djelas bahwa selama ini telah terdapat kerdjasama jang baik setjara langsung atau tidak dengan para ahli dan peminat bahasa. Hanja sadja jang belum banjak terlihat, seperti dikatakan oleh Goenawan Mohamad dalam suatu pemitjaraan beberapa waktu jang lalu dengan saja, ialah keterlibatan setjara langsung sebagian koran atau mass-media lainnja dalam usaha pembinaan bahasa. Djelasnja, berita-berita dalam koran jang bersangkutan, baik jang disusun oleh wartawannja sendiri maupun jang bersumber dari kantor-kantor berita, masih banjak jang belum baik bahasanja. Alangkah akan besar sumbangan koran tersebut djika di samping kesediaan memuat karangan-karangan mengenai bahasa, para wartawannjapun ikut pula setjara sadar memperhatikan bahasa jang mereka pakai. Dengan demikian terhindarlah kesan bahwa pers ikut punja saham dalam perusakan bahasa.

Dari pihak guru-gurupun, sebagai pedjuang-pedjuang bahasa dalam kelasnja masing-masing, tak kurang pula muntjul keluhan menganai masalah pembinaan bahasa chususnja pengadjaran bahasa. mereka sering berbahasa Indonesia dengan memadai. Adalah kurang adil djika semua kesalahan ditimpakan ke pundak mereka. Dengan segala kekurangan dan buku-buku batjaan, beragamnja buku pegangan, kurangnya mereka mengikuti perkembangan bahasa terutama mereka jang tinggal djauh dari kota-kota besar, tiadanja perpustakaan, dan sebagainja adalah merupakan kesukaran mereka sehari-hari di samping kesukaran ekonomi masing2.

Untuk mengatasi perlulah dipikirkan banjak hal. Jang penting adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan mereka, menjempurnakan metode mengadjar dan kurikulum serta mengusahakan adanya perpustakaan jang lengkap. Setahu saja, dalam hal ini pihak Departemen P. dan K. telah mulai mengambil langkah-langkah. Langkah pertama ialah penindjauan kurikulum dan metode mengadjar bahasa mulai dari Sekolah Dasar. Dan di samping itu telah dimulai pula penjeragaman bahan peladjaran. Penataran guru2pun sudah pula dilakukan walaupun belum menjeluruh. Kita harapkan hendaknja kerdja ini berladjut.

Masih banjak sebenarnya masalah pembakuan bahasa ini j'ang dapat kita bitjarakan seperti masalah pembakuan tatabahasa, *perkamusan*, *lafal* dan edjaan jang bersama masalah peristilahan semua merupakan masalah pembakuan bahasa kita jang perlu dilaksanakan setjara berentjana dengan memeperhitungan djangka waktu kerdja, tenaga-tenaga jang dibutuhkan, biaja jang diperlukan, dan sebagainya. penting pula diingat penentuan pilihan masalah jang harus didahulukan hingga hal jang sebenarnya sudah dapat dikerjakan djangan sampai tertunda.

Demikianlah di antara sekian masalah dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia, maka masalah edjaan kiranya tepat diberikan pengutamaan untuk didahulukan penjelesaiannya karena bila dibandingkan dengan masalah bahasa jang lainnja seperti tatabahasa, tata istilah dan perkamusan, maka masalah penjeragaman atau penjempurnaan edjaan tidaklah akan memakan waktu jang lama serta pengerahan tenaga dan biaja jang besar kemudian tenaga kita dapat pula ditjurahkan setjara penuh untuk penggarapan segi-segi jang lain tadi, jang barang tentu sebelumnya sudah kita mulai djuga pengerdjaannya.

Usaha-usaha Penjempurnaan Edjaan

Usaha penjempurnaan edjaan bahasa Indonesia dalam huuf Latin sebenarnya bukanlah usaha jang timbul pada saat2 terachir ini sadja. Sebelum tahun 1901 sudah mulai dirasakan perlunja dilakukan penjeragaman edjaan bahasa Indonesia (melaju) karena pada waktu itu

penulisan bahasa Indonesia dilakukan dengan tjara jang tidak seragam di samping penulisan dengan huruf Arab. Pemerintah Belanda kemudian memberi tugas kepada Ch. A. van Ophuysen untuk memikirkan Hasilnja diumumkan pada tahun 1901, seperti jang dapat kita lihat dalam *kitab Logaat Melajoe*. Dalam edjaan jang baru ini Ophuiyen memasukkan tanda2 diakritik *accent aigu, accent grave, trema, 'ain, hamzah, z, f, ch, sj, dan oe* seperti dalam kata *énak, péndék, masalah, moelai, ladil, tiadal, zaman, fikir, achir, masjarakat dan koekoe*. Kalau kita perhatikan djelaslah bahwa selain sukar, edjaan Ophuysen ini djuga tidak praktis. Sering terdjadi tertukarnja tanda air dengan *hamzah* atau sebaliknya. Tidak praktis karena kita direpotkan oleh banjarknja tanda-tanda diakritik seperti dapat dilihat dalam tjontoh-tjontoh tadi. Keinginan untuk menjederhanakan atau menjempurnakannja kemudian muntjul dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo tahun 1938. Dan mendjadi kenjataan dalam tahun 1947 dengan ditetapkannja peraturan edjaan baru oleh pemerintah Republik Indonesia jang dikenal dengan nama Edjaan Republik atau Edjaan Suwandi (waktu itu Menteri P.P. dan K. ialah Mr. Suwandi). Dalam peraturan edjaan ini tanda2 diakritik *accent aigu, accent grave, trema dan 'ain* dihilangkan. Sedangkan tanda *hamzah* diganti dengan k, dan oe diganti dengan u. Tjontoh: ta' mendjadi tak dan boekoe mendjadi buku. Sampai di sini memang terlihat penjederhanaan dan kepraktisan. Tetapi sajang, edjaan ini tidak memberi tempat untuk *z, f, sj* dan *ch* sebagai fonem2 bahasa Indonesia meskipun dalam kenjataannja ada kontras misalnja antara kata kapan dengan *kafan*, pakt:a dengan *fakta, folio* dengan *folio, sjarat*: dengan *sarat*., chas dengan *kas* dan lain2. Tambahan pula edjaan Suwandi ini tidak membedakan penulisan ke dan di misalnja dan dikota. Ke dan di jang pertama berupa awalan sedangkan ke dan di jang kedua adalah kata depan (preposisi) . ketjuali bila berhadapan dengan huruf besar seperti *ke Djakarta* dan di *Menado*. Selain itu Edjaan Suwandi djuga tidak mengatur pemakaian tanda-tanda batja seperti titik, koma, tanda tanja, tanda seru dan lain-lain. Karena itu tidak mengherankan Kongres Bahasa Indonesia di Medan 1954 jang diprakarsai oleh Menteri P.P.K. Mr. M. Yamin, menghendaki agar Edjaan Suwandi segera disempurnakan. Kongres itu memutuskan supaya pemerintah membentuk sebuah badan jang kompeten untuk

menjusun konsep edjaan baru jang praktis dan sedapat mungkin pertimbangan ilmiah diantaranya prinsip "Isatu fonem satu huruf." Sebagai tindak lanjut keputusan kongres itu, maka pada tahun 1956 Menteri P. P. K. Sarino Mangunpranoto membentuk Panitia Pembaharuan Edjaan Bahasa Indonesia jang dipimpin oleh Prof. Prijono dan E. Katopo. Panitia ini menghasilkan sebuah konsep jang biasa disebut Konsep Edjaan Pembaharuan. Sementara itu pengandjur-pengandjur bahasa kebangsaan di Persekutuan Tanah Melaju jang diilhami oleh Kongres Bahasa Indonesia di Medan berkeinginan pula untuk melaksanakan pembakuan bahasa Melaju. Dan tjita-tjita ini mendjadi kenyataan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melaju di Djohor pada tahun 1956 itu djuga. Keputusan Konggres itu antara lain ialah bahwa mereka berhasrat untuk menjatukan edjaan bahasa Melaju dengan edjaan bahasa Indonesia. Atas keinginan pihak Persekutuan Tanah Melaju itu diadakanlah perundingan-perundingan antara kedua pihak pada bulan Desember 1959 di Djakarta. Dan hasilnja adalah konsep edjaan bersama Melaju-Indonesia jang biasa disebut Edjaan Melindo. Konsep edjaan bersama ini pada dasarnya adalah konsep Pembaharuan jang telah mengalami beberapa perubahan di sana-sini. Direntjanakan oleh kedua pihak edjaan bersama ini akan dilaksanakan selambat-lambatnja pada bulan Djanuari 1962. Tetapi disebabkan situasi politik pada waktu itu (konfrontasi dengan Malaysia). Edjaan Melindo tersebut tidak dapat diresmikan pelaksanaannya. Sesungguhnya bila kita perhatikan, baik konsep Edjaan Pembaharuan maupun konsep Edjaan Melindo setjara praktis dan teknis sukar dilaksanakan karena dalam kedua konsep tersebut dimasukkan beberapa huruf jang baru sama sekali demi memenuhi prinsip "satu fonem satu huruf". Djelas bahwa pemakaian huruf-huruf baru tersebut akan memakan banjak biaya dalam pelaksanaannya karena kita terpaksa mengganti atau memperbaiki mesin tulis dan mesin tjetak untuk memberi tempat kepada huruf-huruf baru tersebut. Di samping itu djuga masih ada kekurangan-kekurangan atau keberatan lainnja dalam beberapa hal. Karena itu tidak djadinja Edjaan Melindo ini dilaksanakan sebenarnya memberikan keuntungan jang banjak bagi kita.

Pada tahun 1966, sesuai dengan semangat orde baru ketika itu, muntjul lagi pemikiran untuk menjempurnakan edjaan bahasa Indonesia

jang resmi berlaku (Edjaan Suwandi) jang dalam kenjataanja sudah sedjak lama tidak ditaati lagi sepenuhnya. Pemakaian huruf-huruf *f*, *ch*, *sj*, *v* dan *z* sudah semakin lazim, pada hal dalam Edjaan Suwandi huruf2 tersebut tidak diberi tempat sebagai fonem-fonem Indonesia karena dianggap pelambangan bunji-bunji asing. Begitupun huruf *y* mulai pula populer. Bahkan tidak kurang dari Presiden Sukarno sendiri menetapkan nama *Kemajoran* diganti dengan *Kemayoran*. Dalam Edjaan Suwandi huruf *y* tersebut tidak pula mendapat tempat.

Didorong oleh keadaan jang demikian dan rasa tjinta terhadap bahasa Indonesia. serta djuga karena sudah dirasakan sekali perlunja penjempurnaan edjaan jang berlaku jang dapat lebih memenuhi perkembangan sosial budaja masjarakat Indonesia, maka pada awal Mei 1966, Lembaga Bahadsa dan Kesusastraan Departemen P. dan K. (sekarang: Lembaga Bahasa Nasional) sesuai dengan tugas jang dibebankan kepadanya, memadjukan sebuah konsep baru penjempurnaabn edjaan bahasa Indonesia hasil sebuah panitia jang ditetapkan oleh Menteri P. dan K. Sarino Mangunpranoto pada tahun 1967 jang masa kerdjanja berlaku surut mulai tahun 1966. Dalam pekerdjaannya panitia ini bertolak dari keinginan untuk menjempurnakan edjaan bahasa Indonesia berdasarkan faktor-faktor: 1) kemandjuaan ilmu pengetahuan dan perkembangan wawasan ilmiah terutama dalam bidang ilmu bahasa jang memberikan patokan baru bagi penjusunan edjaan jang baik; 2) kekurangan jang terdapat pada edjaan jang sekarang dalam hal mentjerminkan kodrat bahasa Indonewsia; 3) perlunja usaha kodofikasi dalam pemakaian huruf dan tanda batja jang bisa berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia; 4) peranan jang akan dimainkan oleh bahasa Indonesia ai Asia Tenggara dan di seluruh dunia; 5) pentingnja pengadjaran membatja dan menulis.

Dalam konsep edjaan jang disempurnakan ini jang biasa2 baru seperti pada konsep Pembaharuan dan Melindo. Djadi tidak akan merubah mesin tulis atau mesin tjetak. Dalam konsep ini ada unsur penghematan seperti *tj* mendjadi *c* dan *dj* mendjadi *j*. Tidak memakai tanda-tanda diakritik. Dan pelaksanaannya tidak akan memakan biaya jang terlalu besar. Konsep ini merupakan hasil kompromi maksimal antara sjarat linguistik (satu fonem satu huruf) dengan sjarat kepraktisan dan

pertimbangan kemasjarakatan. Dan dalam penggarapan panitianja bertolak dari konsep-konsep jang ada sebelumnja.

Usaha penjempurnaan edjaan ini dimaksudkan sebagai langkah pertama dalam kerangka usaha pembakuan bahasa Indonesia jang memerlukan adanja bentuk keseragaman sebagai suatu tanda lahir jang melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa. Bahwa setiap usaha pekerdjaan dalam pembangunan memerlukan biaja, itu sudah djelas bagi kita semua. Begitu pula halnja dengan usaha pembakuan bahasa, sebagai bagian dari usaha pembangunan dalam bidang kebudajaan, tentu memerlukan biaja pula seperti biaja penugasan tenaga-tenaga ahli dalam djumlah jang banjak, padas berbagai tempat dan dalam waktu jang pandjang. Kita tentu semuanja sadar bahwa keuangan negara kita belum mengizinkan pengeluaran biaja jang besar dan menjeluruh seperti pada negara2 lain untuk semua kegiatan pembinaan bahasa sekali gus. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita lalu berpangku tangan dan menunggu sadja. Karena itulah usaha pembakuan bahasa ini dilakukan tahap demi tahap. Dalam hal ini usaha penjempurnaan edjaan merupakan tahap pertama jang setjara relatif lebih tjepat dapat diselesaikan.

Dengan bertolak dari pikiran di atas, maka konsep edjaan jang disempurnakan ini mulai diperkenalkan kepada masjarakat. Suatu hal jang menggembirakan ialah bahwa konsep tersebut mendapat tanggapan jang luas baik tanggapan dari mereka jang dapat menerima maupun jang tidak. Di antara tanggapan jang penting ialah dari bekas wakil Presiden kita Dr. M. Hatta jang menjatakan bahwa konsep edjaan baru tersebut baiklah diserahkan dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk selandjutnja dapat diputuskan diterima atau tidaknja. DPR ini hendaklah DPR hasil pemilihan umum. Pendapat beliau ini sebagai pendapat seorang demokrat jang konsekwen sepantasnja kita perhatikan. Dan karena pada saat pengenalan konsep edjaan itu (1966--1969) DPR kita belum merupakan hasil pemilihan umum, maka achirnja konsep tersebut terpaksa ditunda penjelesaiannya. Sementara itu ketidakseragaman edjaan dalam bahasa kita bukannya makin berkurang dengan ditundanja penjelesaian edjaan itu, malah tambah mendjadi. Saja kira kita semua merasakan hal itu dewasa ini. Pemakaian y makin bertambah banjak. Ada orang mengatakan bahwa y dan j berebut tempat (lihat tulisan S. P. Subroto, Kedudukan J dan Y

dalam bahasa Indonesia sekarang dan beberapa Tjatatatan lain, dalam Harian KAMI 19 Djanuari 1972). Perhatikanlah penulisan Kemayoran, Yogyakarta, karya, yudha, mayapada, jaya dan sebagainya. Siapa tahu Pajakumbuh dan Surabaja akan menjusul pula dengan edjaan jang baru mendjadi Payakumbuh dan Surabaya. Jang djelas pula adalah bahwa Gubernur Ali Sadikin tidak keberatan memakai Jaya Raya seperti jang dapat kita lihat dalam kartu tanda penduduk Djakarta (tertera pada lambang kota Djakarta) di samping penulisan nama madjalah Dewan Kesenian Djakarta Budaja Djaja. Atau pemakaian j dan y tersebut tertjampur sekali gus dalam satu kelompok kata seperti Jajasan Jaya Raya. Tentunja j pada Jajasan dibatja j (jajasan) sedangkan j pada Jaya dibatja dj (djaja) . Tidakkah ini suatu kekatjauan? Di samping itu terlihat pula pemakaian huruf c untuk tj seperti ditemui pada kata cipta dalam lambang Dewan Kesenian Djakarta jang tentunja dibatja tjipta, bukan sipta. Sesungguhnya fonem /y/ jang dilambangkan dengan huruf y seperti pada kata karya dan fonem /j/ jang dilambangkan dengan huruf j seperti pada kata jaya dan fonem /c/ jang dilambangkan dengan huruf c seperti pada kata cipta, sudah selesai dengan konsep edjaan jang disempurnakan (1966) dan konsep Pembaharuan dan Melindo. Tetapi di lain pihak mulai pula terlihat kekatjauan lain jaitu pemakaian ch untuk tj seperti pada kata Kartika Chandra dan kata Chaniago (nama sebuah suku di Minangkabau) jang sesungguhnya djika ditulis dengan Edjaan Suwandi mendjadi Kartika Tjandra dan Tjaniago. Tak tahu kita nama kota Tjurup dan Pat:jit:an entah akan diganti pula mendjadi Churup dan Pachit:an. Pada hal ch dibunjikan ch seperti pada kata achir. Pantaskah bila kita biarkan sadja ketidakteragaman ini berkepanjangan? Belum djugakah pada tempatnya bila kita sekarang ini berusaha dalam waktu jang tidak lama memikirkan penjeragaman dan penjempurnaan edjaan ini dengan sungguh-sungguh dan menjeluruh demi menjantuni bahasa nasional kita?

Djakarta, 4 Pebruari 1972.

EDJAAN SEBAGAI MAS'ALAH

Ayip Rosidi
(Tanggapan)

Edjaan telah muntjul pula sebagai mas'alah. Beberapa tahun jang lampau pemerintah, c.q. Menteri P & K Mashuri SH telah melontarkan "Ejaan Baru" hasil panitia jang diketuai oleh Anton Muljono. Reaksi terhadap "Ejaan Baru" itu terlalu besar dan umumnja bersifat menolak, sehingga pemerintah tahu djuga melangkah surut.

Kalau kita teliti, penolakan terhadap "Ejaan Baru" itu umumnja tidak bersifat tehnis linguistik melainkan bersumber pada soal2 psikologi sosial, bahkan dalam beberapa hal bernada politis djuga.

Hal itu rupanja disadari djuga oleh pemerintah, sehingga ketika hendak melontarkan kembali mas'alah ini ke masarakat, terlebih dahulu orang jang diserahi tanggungjawab untuk menangani soal edjaan itu sekarang, Lukman Ali, menghubungi berbagai pihak dan tokoh jang telah memberikan reaksi terhadap "Ejaan Baru" tempo hari. Pendekatan jang luwes itu nampaknja terutama seolah-olah hanja hendak melontarkan edjaan sebagai mas'alah. Lukman Ali, bahkan dalam tjeramahnja di Teater Arena Taman Ismail Marzuki awal Februari jl., belum lagi melontarkan "Ejaan Baru"-nja, walaupun nampaknja hal itu akan segera dilakukannja, apalagi kalau pemerintah (termasuk Kopkamtib) menganggap mas'alah edjaan itu sebagai mas'alah jang paling penting dalam kehidupan bangsa Indonesia sekarang, terutama kalau desakan dari pihak Malaysia untuk persamaan edjaan kian keras djuga.

Dalam tjeramahnja di Taman Ismail Marzuki itu, Lukman Ali melontarkan kenjataan2 jang menundjukkan betapa katjau-balaunja edjaan jang dipergunakan orang di Indonesia sekarang. Ia memberikan tjontoh bahwa pemerintah DCI Djakarta setjara resmi mengedja "Jaya Raya",

airport "Kemayoran", di mana "j" dibatja "dj" dan "y" dibatja "j"; di samping itu ada pula "Kartika Chandra" dan "Chaniago" di mana "ch" dibatja "tj".

Dari kenyataan itu, Lukman Ali lantas melontarkan pertanyaan: Apakah akan kita biarkan sadja terus berlarut kekatjauan itu? Tidakkah sudah waktunya untuk mengaturnja dalam suatu peraturan resmi jang harus didjadikan pegangan oleh setiap orang?

Pertanyaan2 itu seolah-olah merupakan mas'alah jang paling penting jang kita hadapi dan dengan demikian harus kita djawab; dan tak sulit untuk membayangkan bahwa djawaban jang akan sesuai dengan kehendak penanja adalah: Ja, kita perlukan sekarang sebuah sistim edjaan jang resmi, jang dapat didjadikan pedoman oleh setiap orang kalau menulis dalam bahasa Indonesia. Dan nistjaja "Ejaan Baru"pun akan keluar sebagai satu-satunja djalan keluar!

Padahal pertanyaan2 itu dapat pula kita kembalikan dengan pertanyaan pula: Betul memang, banjak kekatjauan jang timbul dalam mendedja bahasa Indonesia sekarang, tetapi betulkan sebabnja karena tidak ada sistim edjaan resmi jang sekarang berlaku? Betulkah mas'alah itu akan dapat diatasi dengan mendekritkan sistim "Ejaan Baru" supaja berlaku? Tidakkah kekatjauan dalam menulis bahasa Indonesia sekarang ini disebabkan terutama oleh kenyataan betapa menjedihkannya pendidikan dan pengadjaran bahasa Indonesia selama ini? Kalau kita perhatikan, barangkali dapat kita lihat kenyataan bahwa sedjak di sekolah dasar sampai di universitas tak pernah anak2 kita mendapat kesempatan untuk beladjar mendedja. Dalam peladjaran bahasa Indonesia, soal edja-mendedja bukanlah hal jang dianggap penting oleh guru ataupun oleh penulis buku peladjaran.

Karena sebenarnja sekarangpun kita mempunjai satu sistim edjaan resmi jang berlaku, walaupun mungkin sudah tak seorangpun mempedulikkannya lagi. Edjaan jang saja maksudkan itu adalah Edjaan Suwandi jang diumumkan tahun 1947. Jang terpenting dari sistim edjaan itu dan jang diterima setjara mutlak oleh setiap orang ialah penggantian "oe" edjaan Ophuysen mendjadi "u"; tetapi soal2 lainnya dalam sistim edjaan itu agaknja telah diabaikan orang.

13. Mengapa? Apakah karena orang dengan sengadja mengabaikannya? Apakah karena orang melihat kelemahan2 setjara tehnik linguistik di dalamnya?

Menurut hemat saja, pengabaian itu tidaklah sengadja, melainkan hanya sebagai akibat dari kurang intensifnja pengadjaran bahasa Indonesia dan tidak berwibawanya instansi jang mengurus bahasa Indonesia belaka.

Dengan kata lain, kalau pengadjaran bahasa Indonesia tjukup baik, kalau instansi jang mengurus bahasa Indonesia seperti Lembaga Bahasa Nasional (jang sudah berkali-kali bertukar nama) mendapat kepertajaan pemerintah setjara penuh untuk mengurus bahasa Indonesia dengan pembiajaan jang tjukup sehingga berwibawa di dalam masjarakat luas, maka persoalan edjaan tidak akan mendjadi mas'alah sama sekali.

Betapapun, edjaan Suwandi jang masih mendjadi dasar penulisan bahasa Indonesia sekarang, masih tjukup baik dan lebih sistimatis daripada edjaan bahasa Inggris misalnja. Dalam bahasa Inggris edjaan tak mempunjai ketentuan jang tetap, bunji setiap huruf tidaklah tetap, sehingga "i" kadang2 dibatja "ai" (dalam kata2 "I" dan "like"), kadang2 pula dibatja "i" (dalam kata2 "still", "wing"); "ou" kadang2 dibatja "a" (dalam kata2 "lough", "tough"), kadang2 dibatja "u" ("trouh", "blouse"); "u" kadang2 dibatja "a" ("but", "bus"), kadang2 dibatja "ju" ("excuse"); kadang2 dibatja "u" ("rule"); "ch" kadang2 dibatja "tj" ("chalk"), kadang2 dibatja "k" ("orchard") -- sehingga adalah termasuk kelaziman kalau orang2 Inggris berkenalan saling menjebut nama masing2 lalu saling bertanja: "How to spell it?".

Maka tidaklah mengherankan kalau timbul gelombang2 di kalangan ahli bahasa Inggris jang mengusulkan agar edjaan bahasanya itu dirubah dan disistimatikkan, a.l. oleh pengarang terkenal George Bernard Shaw. Maka bahasa Melaju jang dalam mengedja banjak bertjermin ke dalam bahasa Inggris punja djuga kegandjilan2. Mereka mengedja: "pi" - "ai" - "pi" - "ei", tetapi kalau sudah mendjadi kata bunjinja mendjadi "pipa" sama seperti dalam bahasa Indonesia -- entah ke mana "ai" dan "ei" itu!

Adalah suatu hal jang memudahkan bagi mereka jang mempeladjar bahasa Indonesia, termasuk orang2 asing, karena setiap huruf dalam

bahasa Indonesia bunjinja sama, baik berdiri sendiri maupun bergabung dengan huruf lain. "Tj" tetap "tj" menghadapi huruf apapun atau bunji apapun djuga. Huruf "dj" tetap "dj", baik menghadapi vokal ataupun konsonan. Demikian djuga dengan "a" jang tetap berbunyi "a" di manapun ia diletakkan.

Gelombang reaksi jang besar terhadap "Ejaan Baru" terutama adalah tuduhan seakan-akan dengan "Ejaan Baru" kita mengikuti edjaan Malaysia. Walaupun telah dibuktikan, bahwa setjara tehnis linguistik dalam "Ejaan Baru" lebih banjak orang Malaysia jang menjesuaikan diri daripada kita, namun kesan orang bahwa kita mengikuti Malaysia tetap ada. Kesan orang awam itu disebabkan karena penggantian huruf "dj" mendjadi "j" dan huruf "tj" mendjadi "c". Walaupun orang Malaysia mengedja "tj" selama ini dengan "eh", namun orang awam tidak akan memperhatikannja. Dan karena itu selama "Ejaan Baru" atau edjaan jang ditawarkan tetap merubah kedua huruf "tj" dan "dj" itu, maka kesan itu akan tetap timbul bahwa kita telah mengikuti Malaysia.

Para ahli jang bersikeras hendak merubah "tj" mendjadi "c" mengadjukan alasan bahwa dengan demikian kita telah menghemat satu huruf dan huruf itu (c) lebih sesuai dengan edjaan jang berlaku di dunia ilmiah. Tapi kalau kita adjukan pertanyaan "Mengapa huruf "ny" dan "ng" jang dalam bahasa kita penggunaannja lebih banjak daripada "dj" dan "tj" tidak diganti? Mengapa huruf "sy" pun tetap dipertahankan?", maka ia akan segera mendjawab: "Kita harus memilih huruf jang sudah ada dan perubahan abjad djangan sampai memakan biaja jang terlalu besar!" Djadi tidak usah menghemat! Djadi tidak usah ilmiah!

Tapi kita tak tahu apa djawabnja, kalau kita minta dihitung setjara teliti dan ilmiah berapa banjak penghematan jang dapat kita lakukan dengan merubah "tj" mendjadi "c" dan "dj" mendjadi "j" (hilang satu huruf)? Dan berapa banjak pula biaja jang dikeluarkan hanja untuk memepopulerkan dan membantah reaksi orang2 jang menolak "tj" menjadi "c" dan "dj" menjadi "j"?

Kalau betul2 mau menghemat, maka kalau terbukti bahwa penghematan jang diperoleh dalam soal "tj" menjadi "c" dan "dj" mendjadi "j" tak lebih besar daripada biaja jang dikeluarkan untuk

memaksakan kedua huruf itu, maka setjara pragmatis panitia harus jujur untuk melangkah surut dan mempertahankan "tj" dan "dj" sebagaimana adanya.

Maka djalan jang terbaik, sependjang pikiran sehat saja, ialah bagaimana mengintensifkan pendidikan bahasa Indonesia, baik di masyarakat luas, terutama di sekolah2, dan bagaimana menjempurnakan edjaan Suwandi dengan beberapa rasionalisasi. Jang saja maksudkan dengan rasionalisasi ialah; peresmian huruf2 jang masih diragukan oleh edjaan Suwandi misalnja huruf2 f, x, v, z, : pemberian tanda (') accent aigu di atas huruf é-tadjam untuk membedakannja dengan e-lemah dan membedakan tjara menulis preposisi dengan awalan, terutama mengenai "ke" dan "di".

Huruf2 f, v, x, z, dalam edjaan Suwandi belum diterima setjara resmi, tetapi sekarang telah setjara luas dipergunakan, karena itu buat apa berlama-lama kita biarkan masuk setjara tak remi?

Pembedaan antara é-tadjam dengan e-lemah sangat penting sekali karena bahasa Indonesia sekarang masih dalam tingkat pertumbuhan, sehingga setiap saat bermasukkan kata2 baru baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Meskipun kita berprinsip bahwa kata2 bahasa asing jang kita pindjam itu dapat kita sesuaikan dengan kita dan tak usah selalu kita pertahankan menurut bahasa asalnja, tetapi hendaklah ada keseragaman dalam membunjikan sesuatu kata, djangan sampai oleh sebagian dibunjikan "e" dan oleh sebagian lagi dibunjikan "è". Alasan jang dikemukakan bahwa kedua huruf itu tidak usah dibedakan karena tak banjak kata2 jang sama seperti "perang" dan "pérang" jang mungkin menimbulkan salah faham, tak dapat diterima karena edjaan bukanlah mengurus soal salah faham, melainkan mengurus soal salah batja. Dan salah batja karena tidak memberi tanda jang membedakan "e" dan "é" telah banjak terdjadi, sehingga kita sekarang mendengar orang mengutjapkan "pameran" di samping "paméran", "péta" di samping "peta", "rèkan" di samping "rekan", dll.

Salah batja itu dapat diatasi kalau kita telah mempunyai Kamus standard jang lengkap dan baik, jang selalu up to date; atau kalau kita telah mempunyai sistim pendidikan dan pengadjaran bahasa Indonesia

jang demikian sempurna sehingga Lembaga Bahasa Nasional dapat setjara teratur dan tetap mengirinkan daftar kata2 dan tjara mengutjapkanja ke sekolah2.

Tapi karena kedua hal itu dalam waktu jang masih lama belum mungkin dilaksanakan di Indonesia, maka djalan keluar praktis dengan memberikan tanda jang membedakan e-tadjam dan e-lemah dlam sistim edjaan adalah djalan jang tersingkat.

Bagi saja, tak mendjadi soal jang mana jang akan diberi tanda, e-tadjam (é) atau (è) apakah e-lemah (e) atau (e). Pendeknja salah satu harus dibedakan dari jang lain.

Mengenai tjara membedakan tjara menulis preposisi (di, ke, kepada, dari) dari awalan (terutama di dan ke) jang masih belum dilakukan dalam sistim edjaan Suwandi, barangkali sebagai akibat dari kekeliruan jang telah dibuat oleh Ophuysen dalam sistim edjaannja. Dalam edjaan Ophuysen tjara menulis "di" dan "ke" preposisi sama sadja dengan tjara menulis "di" dan "ke" awalan, sehingga menurut sistim edjaannja ditulis "dirumah", "dipukul" dll. Padahal "dari" ditulis terpisah, misalnja "dari rumah" dan bukan "darirumah".

Maka adalah logis kalau sekarang kekeliruan Ophuysen jang dilandjutkan oleh Suwandi itu kita perbaiki, sehingga menulis "di" dan "ke" preposisi sama dengan tjara menulis "dari" dan bukan sama dengan tjara menulis "di" dan "ke" awalan.

Barangkali jang masih dapat dipertimbangkan djuga adalah menulis "ch" dalam kata "achir", "chabar", "chatulistiwa" diganti dengan "kh", karena memang bunji suaranja lebih dekat dengan "k" daripada dengan "c".

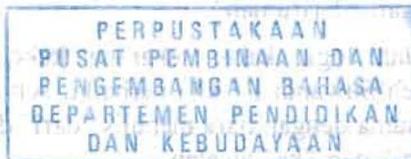
Djuga tanda hamza (') daripada diganti dengan "ka" seperti dalam katja2 "tidak", "tak", "bapak", lebih baik dibuang sadja dan setiap huruf "k" dibunjikan dengan njata, sehingga akan terhindarlah orang2 Djawa membatja perkataan "pendidikan" mendjadi "pendidi'-an", "belokan" mendjadi "belo'-an", dst. Djumlah kata2 jang achirnja berhamzah tidak banjak dan dapat diabaikan apabila kita bandingkan dengan kekeliruan utjap menganggap setiap huruf "k" sama dengan hamzah (') sadja.

Dengan perbaikan² dan penjempurnaan seperti itu, menurut hemat saja edjaan Suwandi dapat tetap dipertahankan sebagai edjaan jang tjukup tepat untuk menuliskan bahasa Indonesia dalam huruf Latin -- dan tak ada alasan jang tjukup rasional untuk "menjempurnakan" edjaan tersebut sampai dengan merubah huruf "tj" dengan "c" atau "dj" dengan "j" -- ketjuali kalau memang nama Suwandi dalam nama edjaan itu mau diganti dengan nama mentri P & K sekarang. Tapi soal itu saja kira berada di luar mas'alah edjaan sama sekali!

Djakarta, 14 Februari 1972.

Budaya Djaja. No. 46

Tahun Kelima, Maret 1972



07-3736

URUTAN			
9	8	.	498

F
499.
A